

**PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
BERDASARKAN PERMENDAGRI  
NOMOR 113 TAHUN 2014**  
(Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**HAKIM WAHYU RAMADHANA**

**NIM. 145030500111005**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT ILMU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
MALANG  
2018**

## MOTTO

*“Doa adalah ikhtiar bathiniah, sedangkan ikhtiar adalah doa lahiriah”*

~ KH. Hasyim Muzadi ~

*“karena semua urusan kita mesti berjalan dengan baik,  
maka sisipkan doa & harapan pada tiap-tiap urusanmu padaNya”*

~ Hakim W. Ramadhana ~

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri  
Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul  
Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

**Disusun Oleh** : Hakim Wahyu Ramadhana

**NIM** : 145030500111005


**Fakultas** : Ilmu Administrasi

**Jurusan** : Ilmu Administrasi Publik

**Konsentrasi** : Ilmu Administrasi Pemerintahan

Malang, 09 Juli 2018

Komisi Pembimbing



**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**

**NIP. 19531222 198010 1 001**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 19 Juli 2018  
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB  
Skripsi Atas Nama : Hakim Wahyu Ramadhana  
Judul : Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)

**Dan dinyatakan LULUS**

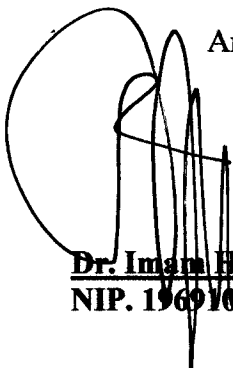
### MAJELIS PENGUJI

Ketua



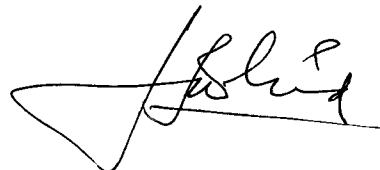
**Dr. Tjahjanulin Domai, MS**  
**NIP. 19531222 198010 1 001**

Anggota



**Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

Anggota



**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
**NIP. 19561209 198703 1 008**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO.20 Tahun 2003, pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 09 Juli 2018



**Hakim Wahyu Ramadhana**  
**NIM. 145030500111005**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmaniraahim*

*Kupersembahkan karya sederhana ini bertujuan:*

*Ibuk Bapak, yang bekerja keras, tiada henti memberi nasehat, dan selalu menjadi teladan bagi anak-anaknya*

*Farhan dan Dina, kedua sosok adik yang selalu jadi penyemangat kakaknya*

*Ashamuda, sahabat-sahabat yang mengajarkan berbagai macam arti perjuangan*

*Almamater yang selalu kubanggakan*

*untuk kamu,*

*seseorang yang aku semogakan*

## RINGKASAN

Hakim Wahyu Ramadhana, 2018. **Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)**. Skripsi. Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 157 hlm + xvii.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menentukan kembali posisi, peran dan kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Salah satu bentuk dari hal itu adalah pemberian kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan desa sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi peraturan dasar pengelolaan keuangan desa yang ada di desa. Keuangan desa di desa Pujonkidul selalu meningkat, yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.831.968.000,00. Sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.847.342.000,00. Diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik untuk mencapai tujuan dari desa. Oleh karena itu, penelitian tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa Pujonkidul dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk dapat memahami fenomena tentang pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh. Deskriptif dipilih untuk menjadi cara penelitian, karena dengan cara mendeskripsikan seluruh kegiatan dapat menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan dengan jelas. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada informan dengan membandingkan hasil wawancara informan satu dengan yang lainnya dan data pendukung tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terlaksana cukup baik sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum dan pembagian tugas yang jelas dan rinci, aplikasi SISKEUDES, dan tingkat partisipasi masyarakat. Namun, pada tahap pelaksanaan daripada pengelolaan keuangan desa dalam penerapan asas akuntabel terkadang masih terdapat kekurangan dari segi administrasi. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumberdaya aparatur pemerintah desa terutama bidang teknologi informasi, keterlambatan pencairan anggaran, kurangnya pendamping dari pemerintah di atasnya.

Sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal administrasi dan teknologi informasi bagi perangkat desa, perlu adanya peran lebih dari pemerintah maupun pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa beserta penerapan asas-asasnya sehingga pencairan anggaran

menjadi tepat waktu, serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan terlaksana dengan lebih baik.

**Kata Kunci: Desa, Pengelolaan Keuangan Desa**





## SUMMARY

Hakim Wahyu Ramadhana, 2018. **Management of Village Finance Based on Permendagri No. 113 of 2014 (Study on Pujonkidul Village Pujon Subdistrict Malang Regency)**. Minor Thesis. Major of Government Administration. Department of Public Administration. Brawijaya University of Malang. Dr. Tjahjanulin Domai, MS. 157 p. + xvii.

The legality of Law Number 6 Year 2014 on the Village is expected to re-determine the position, role and authority in managing its own government. One form of it is the granting of authority in the context of managing the village's own finances. Permendagri Number 113 Year 2014 on Village Financial Management, became the basic rules of village financial management in the village. Village finance in the village of Pujonkidul always increases, in 2016 amounting to Rp.831.968.000,00. While in the year 2017 increased to Rp.847.342.000,00. There needs to be a good village financial management to achieve the objectives of the village. Therefore, research on Village Financial Management based on Permendagri Number 113 Year 2014 in Pujonkidul Village becomes important to be done to know how the financial management of Pujonkidul village and what are the supporting factors and its inhibiting factors.

This study uses a qualitative approach with the aim to understand the phenomenon of village financial management as a whole. Descriptive is chosen to be a way of research, because by way of describing all activities can describe the whole series of activities clearly. The research was conducted by in-depth interviews to informants by comparing the results of informant interviews with each other and supporting data on village financial management based on Permendagri No. 113 of 2014.

Based on the results of research undertaken, the stages of village financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability performed quite well. This is because the legal basis and a clear division of tasks and detailed, SISKEUDE application, and the level of community participation. However, at the implementation stage rather than the management of village finances in the application of accountable principles, there are sometimes shortcomings in terms of administration. This is due to the limited resources of village government apparatus, especially in information technology, budget disbursement delay, lack of companion from the government, as well as the relatively low level of village community education.

Therefore, the need for training and technical guidance in administration and information technology for village apparatus needs more role of government and local government in the implementation of village financial management along with the application of its principles so that the budget disbursement becomes timely, and the implementation of village financial management will be done better.

**Keywords: Village, Management of Village Finance**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, atas perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada iman dan islam.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan.

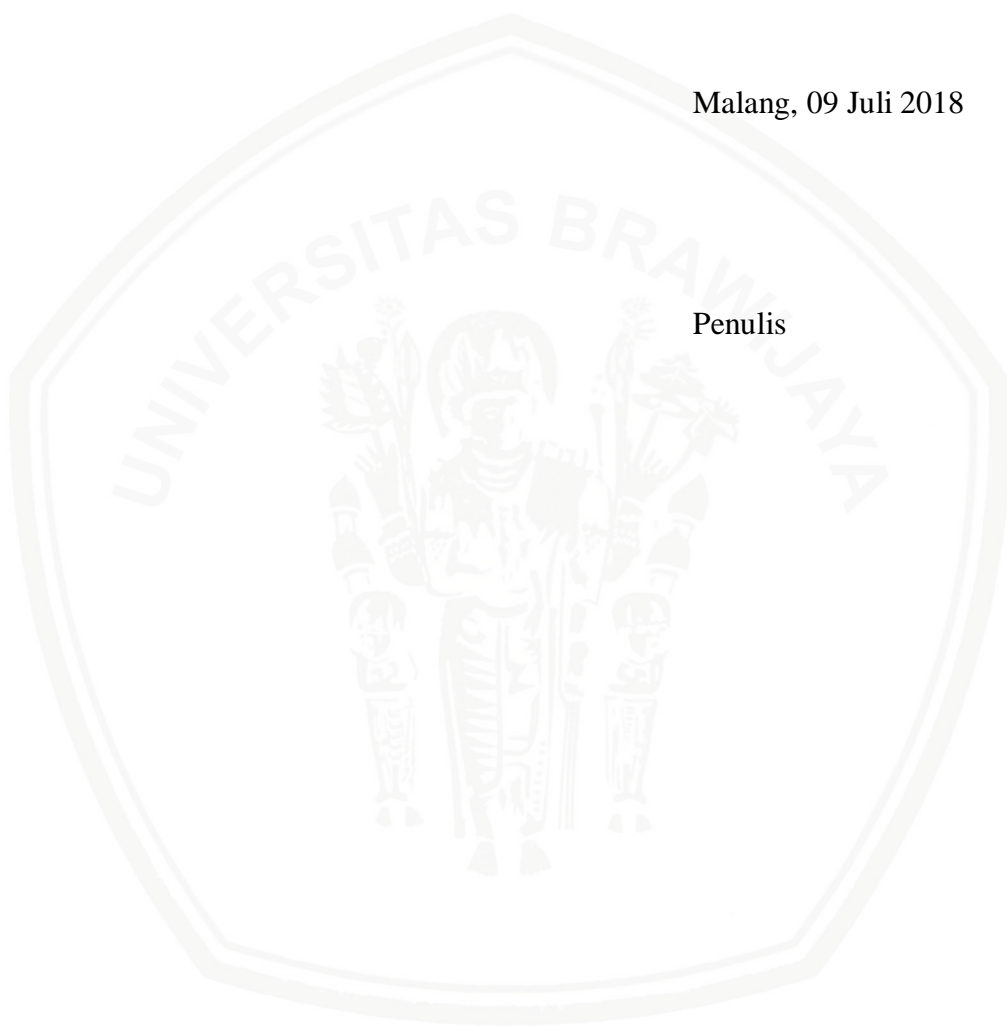
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, M.S selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul beserta semua pihak Pemerintah Desa Pujonkidul yang memberikan izin serta membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Keluarga Besar Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang yang telah memberikan tempat bernaung, tempat menambah ilmu, mendidik diri, memberikan bekal kelak untuk hidup para santri-santrinya nanti.
7. Sahabat Ashamuda angkatan 2014 Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang yang masih berjuang bersama di Pesantren dan berjuang meraih gelar di kampusnya masing-masing.
8. Keluarga Ospam Nirmala 2017-2018 atas kebersamaan dalam proses pembelajaran, perjuangan memanajemen waktu. Semoga hasil ini tidak mengkhianati prosesnya.
9. Teman-teman Ilmu Administrasi Pemerintahan angkatan 2014 yang selama hampir 4 tahun dari awal kita belajar hingga kini menyelesaikan bangku perkuliahan demi mencapai kesuksesan.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb*

Malang, 09 Juli 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kontribusi Penelitian .....	11
E. Sistematika Pembahasan .....	12
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	 <b>15</b>
A. Administrasi Publik .....	15
B. Manajemen Sektor Publik .....	16
1. Manajemen Sektor Publik Berbasis Kinerja .....	16
2. Pengertian Manajemen Berbasis Kinerja .....	17
3. Manajemen Strategis .....	18
C. Pemerintahan Desa .....	20
1. Pengertian Desa .....	20
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	22
3. Administrasi Desa .....	31
D. Pengelolaan Keuangan Desa .....	33
1. Pengertian Keuangan Desa .....	33
2. Pengelolaan Keuangan Desa .....	35
3. Azas Pengelolaan Keuangan Desa .....	35
4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa .....	37
5. Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian .....	47
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50

F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	52
H. Keabsahan Data.....	55
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Gambaran Umum Kecamatan Pujon .....	57
2. Gambaran Umum Desa Pujonkidul .....	59
B. Penyajian Data Penelitian.....	68
1. Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	68
2. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	85
3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	88
C. Analisis Data dan Pembahasan .....	90
1. Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	90
2. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	109
3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul .....	111
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>114</b>
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>118</b>

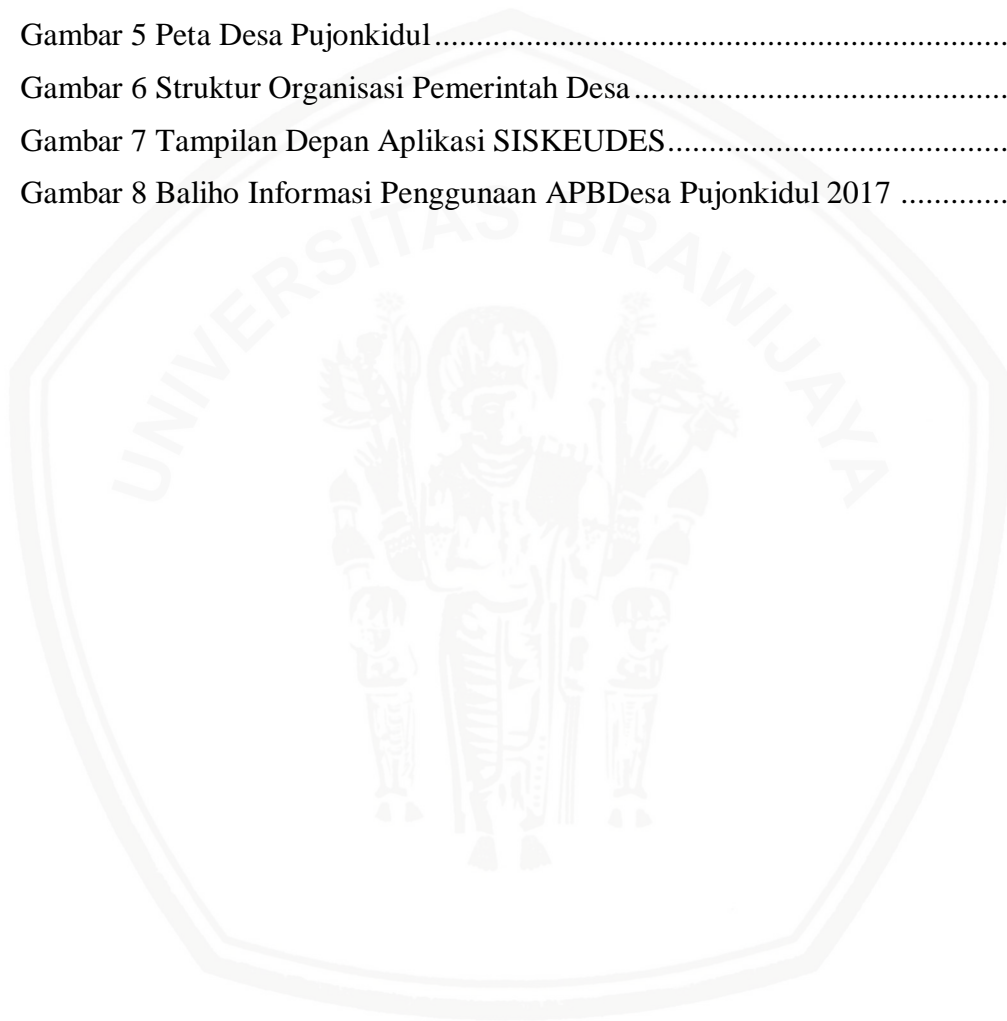


## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT menurut Kecamatan di Kabupaten Malang .....	6
Tabel 2 Nama Desa Jumlah Dusun, RT, RW, Luas Desa .....	58
Tabel 3 Masa Kepemimpinan Kepala Desa .....	60
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	62
Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk .....	65
Tabel 6 Sarana Pendidikan .....	66
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat .....	67
Tabel 8 Aset Prasarana Kesehatan .....	68
Tabel 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul 2017 .....	72
Tabel 10 Pendapatan APBDesa Pujonkidul Tahun 2017 .....	73
Tabel 11 RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana .....	76
Tabel 12 Rincian Belanja APBDesa Pujonkidul Tahun 2017 .....	77
Tabel 13 Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPDesa Pujonkidul 2017 .....	81
Tabel 14 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017 .....	94
Tabel 15 RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana .....	98
Tabel 16 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa .....	99
Tabel 17 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017 .....	102
Tabel 18 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa .....	104
Tabel 19 Prosentase Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pujonkidul 2017 .....	105
Tabel 20 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan .....	106

## DAFTAR GAMBAR

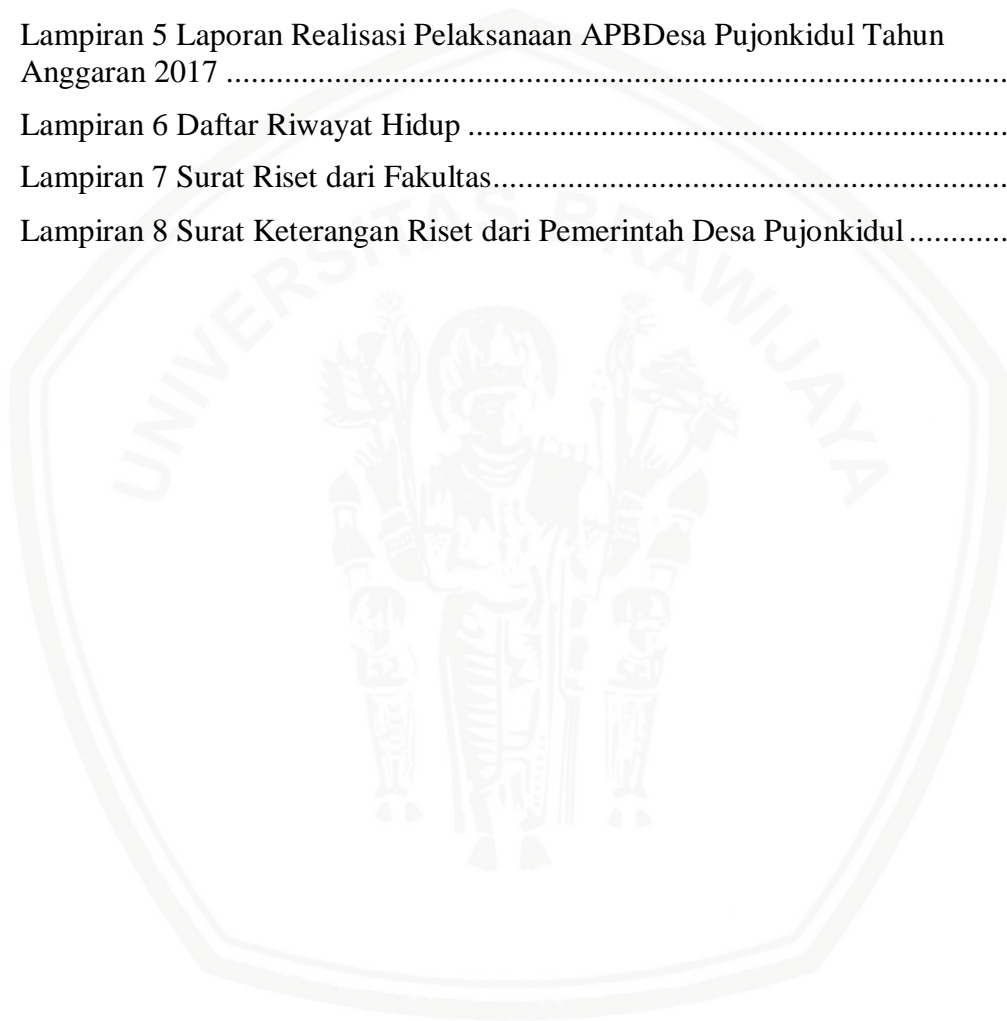
Gambar 1 Penyerapan Dana Desa .....	5
Gambar 2 Persentase Kepala Desa Menurut Tingkat Pendidikan 2016 .....	7
Gambar 3 Dana Desa Kabupaten Malang .....	8
Gambar 4 Komponen Analisis Data Model Interaktif .....	53
Gambar 5 Peta Desa Pujonkidul .....	61
Gambar 6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	62
Gambar 7 Tampilan Depan Aplikasi SISKEUDES .....	79
Gambar 8 Baliho Informasi Penggunaan APBDesa Pujonkidul 2017 .....	84





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	121
Lampiran 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	122
Lampiran 3 Alur Pengelolaan Keuangan Desa.....	138
Lampiran 4 APBDesa Pujonkidul Tahun Anggaran 2017 .....	145
Lampiran 5 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pujonkidul Tahun Anggaran 2017 .....	150
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup .....	155
Lampiran 7 Surat Riset dari Fakultas.....	156
Lampiran 8 Surat Keterangan Riset dari Pemerintah Desa Pujonkidul .....	157



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, demikian sesuai bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Secara historis Indonesia memiliki desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Menurut Eko (2015:109) sebutan untuk desa juga berbeda-beda tergantung asal usul terbentuknya seperti pakraman, gampong, banua, nagari, lembang, kampung, dan lain-lain yang lahir jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada peraturan perundang-undangan sebelumnya yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa telah terjadi penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, sehingga telah mengubah total wajah desa. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, juga mengalami hal yang sama. Undang-Undang yang pada awalnya menjanjikan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi, dan pemberdayaan

masyarakat hanyalah janji hukum yang kosong. Yang terjadi adalah konflik antara kepala desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) dalam merumuskan dan menentukan keputusan desa.

Pada tahun 2004 terdapat revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Alasan utama terjadinya revisi tersebut adalah amandemen kedua UUD 1945, dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang daerah dan desa juga menjadi satu paket. Namun, perhatian utama tetap diberikan pada daerah ketimbang desa, dengan diaturnya desa hanya dalam satu bab saja di dalam Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi desa dianggap bercabang dan cenderung kabur. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli, maka desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self-governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan kepada desa. Dua prinsip/asas dalam pengaturan tentang desa tersebut menimbulkan ambivalensi dalam menempatkan kedudukan dan kewenangan desa (Suharto, 2016:12).

Ketidakjelasan posisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dianggap bahwa belum adanya landasan pijakan yang kuat untuk mengarahkan pada pencapaian cita-cita desa yang mandiri, demokratis dan

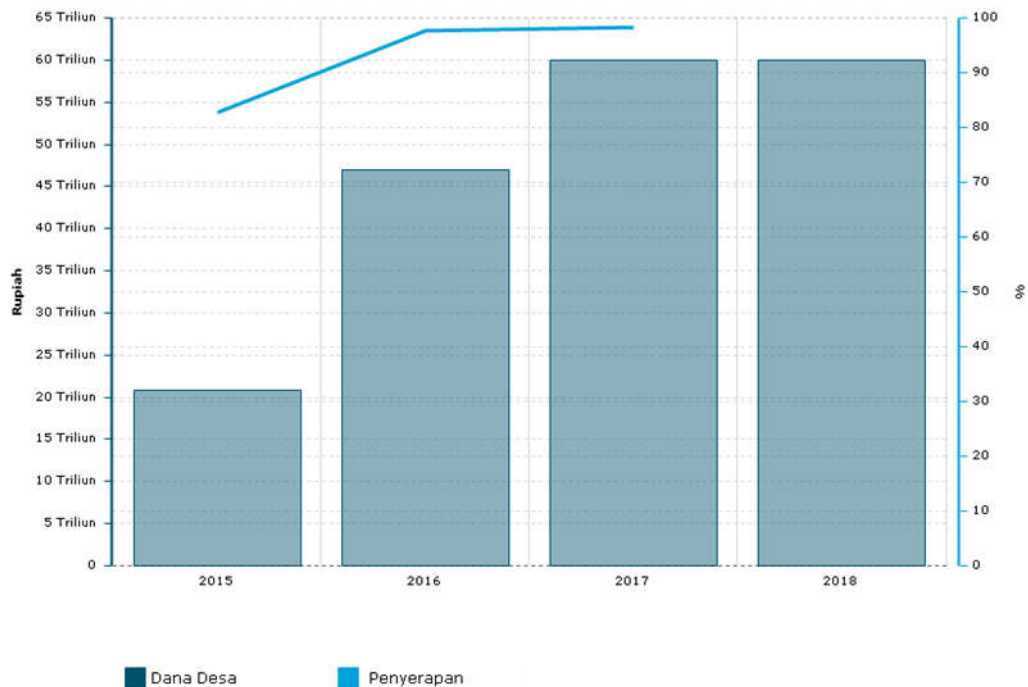
sejahtera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi pada kenyataannya belum membawa dampak sebagaimana nilai-nilai positif yang terkandung dalam konsep desentralisasi. Antara lain terlihat dari belum terwujudnya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Realitas-realitas di atas terutama disebabkan oleh ketidakjelasan posisi desa dalam pelaksanaan desentralisasi selama ini (Suharto, 2016:12). Hal inilah yang kemudian menjadi awal mula lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disahkan pada tanggal 15 Januari 2014.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini diharapkan dapat menentukan kembali posisi, peran dan kewenangan dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Selain hal tersebut desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini bertujuan untuk menentukan format desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keberagaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui partisipasi masyarakat desa, ketahanan sosial budaya masyarakat desa, serta perekonomian masyarakat desa. Selanjutnya, diikuti dengan terbentuknya pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai dengan apa yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah satu bentuk daripada penguatan kemandirian desa melalui pemerintah desa yang profesional, yakni pemberian kewenangan dalam rangka pengelolaan keuangan desa sendiri. Adanya kewenangan desa untuk pengelolaan keuangan desa tentunya berakibat bahwa desa membutuhkan

sumberdaya aparatur yang baik pula, karena pengelolaan keuangan desa mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan desa, serta kualitas sumberdaya aparatur desa sendiri.

Selanjutnya untuk melaksanakan kewenangan diatas maka disahkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini memuat di dalamnya aturan-aturan tentang asas daripada pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, tentang APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), tentang pengelolaan itu sendiri yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta memuat juga tentang pembinaan dan pengawasan daripada pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Permendagri ini sendiri telah memasuki tahun keempat. Untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pemerintah telah melakukan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan Dana Desa. Terakhir, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa. Pada awalnya, dana desa yang terserap baru 82% pada 2015. Selanjutnya, penyerapan naik terus hingga mencapai 98% pada 2017 (Gambar 1).



**Gambar 1 Penyerapan Dana Desa**

Sumber: katadata.co.id, 2018

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp 60 triliun untuk Dana Desa. Jumlah tersebut setara dengan Rp 800 juta/desa dengan target mencapai 74.957 desa. Prioritas Dana Desa adalah untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kemajuan desa.

Pada pengelolaan dana desa, secara menyeluruh Kabupaten Malang menjadi nomor dua terbaik di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi (*malangtimes.com*, 2017). Kabupaten Malang dalam hal pengelolaan keuangan desa sangat bagus dan terintegrasi sesuai dengan program pemerintah desa.

**Tabel 1 Banyaknya Kelurahan/Desa, RW dan RT menurut Kecamatan di Kabupaten Malang**

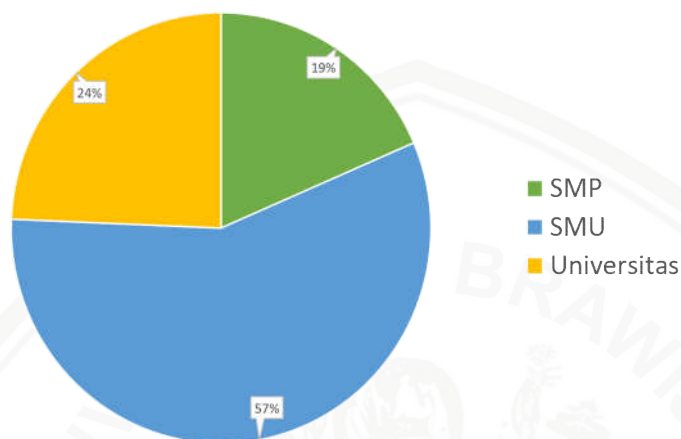
No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	RW	RT
1.	Donomulyo	-	10	119	502
2.	Kalipare	-	9	75	459
3.	Pagak	-	8	77	337
4.	Bantur	-	10	96	492
5.	Gedangan	-	8	84	358
6.	Sumbermanjing	-	15	115	539
7.	Dampit	1	11	114	711
8.	Tirtoyudo	-	13	62	295
9.	Ampelgading	-	13	97	316
10.	Poncokusumo	-	17	168	825
11.	Wajak	-	13	145	486
12.	Turen	2	15	172	704
13.	Bululawang	-	14	89	351
14.	Gondanglegi	-	14	59	382
15.	Pagelaran	-	10	63	277
16.	Kepanjen	4	14	77	468
17.	Sumberpucung	-	7	53	258
18.	Kromengan	-	7	51	233
19.	Ngajum	-	9	99	354
20.	Wonosari	-	8	78	308
21.	Wagir	-	12	96	387
22.	Pakisaji	-	12	87	373
23.	Tajinan	-	12	75	360
24.	Tumpang	-	15	104	646
25.	Pakis	-	15	147	831
26.	Jabung	-	15	82	476
27.	Lawang	2	10	151	631
28.	Singosari	3	14	138	789
29.	Karangploso	-	9	109	494
30.	Dau	-	10	79	338
31.	Pujon	-	10	82	349
32.	Ngantang	-	13	73	348
33.	Kasembon	-	6	67	192
<b>Jumlah</b>		12	378	3.183	14.869

Sumber: Olahan Peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Dari data yang didapatkan untuk Kabupaten Malang dalam setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa dan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam dusun/dukuh ataupun rukun warga (RW)/rukun tetangga



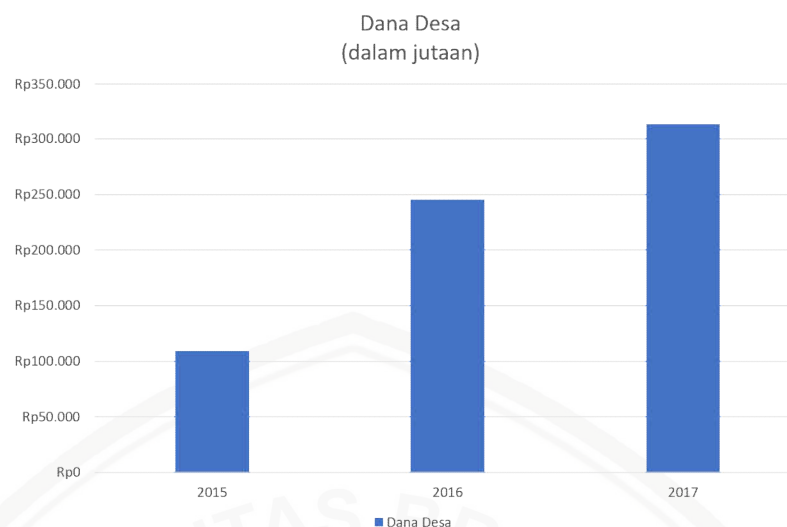
(RT). Secara rinci wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 wilayah kecamatan yang membawahi 12 kelurahan dan 378 desa, yang terbagi habis ke dalam 3.183 RW dan 14.869 RT (Tabel 1).



**Gambar 2 Persentase Kepala Desa Menurut Tingkat Pendidikan, 2016**  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Data di atas menunjukkan data pendidikan yang ditamatkan oleh kepala desa/lurah didominasi oleh lulusan SMA/ sederajat dengan rincian sebagai berikut: mulai dari SMP/ sederajat 18,52%, SMA/ sederajat 57,14%, dan Universitas 24,34% (Gambar 2). Meskipun tingkat pendidikan daripada kepala desa secara umum mayoritas adalah SMA/ sederajat, akan tetapi Kabupaten Malang berhasil menjadi nomor dua terbaik di Jawa Timur tentang cara pengelolaan dana desa setelah Kabupaten Banyuwangi (*malangtimes.com*, 2017).





**Gambar 3 Dana Desa Kabupaten Malang**

Sumber: Olahan Peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS), 2017

Dari gambar diatas terlihat bahwa sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 dana desa daripada Kabupaten Malang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Dana Desa Kabupaten Malang sebesar Rp. 109.423.772.000,00; pada tahun 2016 Dana Desa Kabupaten Malang sebesar Rp. 204.547.356.000,00; dan pada tahun 2017 Dana Desa Kabupaten Malang sebesar Rp. 312.979.737.000,00. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan adanya kontrol agar tercapai hasil yang baik daripada pengelolaan keuangan desa.

Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Desa Pujonkidul merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah sekitar 323.159 hektar. Keseharian masyarakat desa Pujonkidul

adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, kambing, ayam, itik), buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Pujon Kidul adalah persawahan. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan dengan menanam padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional.

Potensi unggulan Desa Pujonkidul ditandai dengan kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Mengingat wilayah Desa Pujon Kidul 65% persawahan yang merupakan lahan mata pencaharian bagi masyarakat. Selain hal tersebut Desa Pujonkidul juga memiliki anggaran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp.847.342.000,00. Hal ini mengharuskan Desa Pujonkidul untuk mengelola dana desa dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan tahun 2016 yakni sebesar Rp.831.968.000,00. Desa Pujonkidul juga sering dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangan desa oleh desa-desa lain. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa dengan jumlah yang besar tentu membutuhkan sumberdaya aparatur desa yang memadai, sehingga pendapatan desa dan realisasinya dapat dihasilkan hasil yang seimbang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk meninjau bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 melalui pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul pada tahun anggaran 2017. Sehingga penulis tertarik membahas dan menganalisa dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan**

**Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”.**

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa

berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

##### **1. Kontribusi Akademis**

###### **a. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi pemerintahan terutama terkait dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

###### **b. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi bagi peneliti dalam bidang atau topik ilmu administrasi pemerintahan khususnya pada pengelolaan keuangan desa.

##### **2. Kontribusi Praktis**

###### **a. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dari sudut pandang akademisi bagi pemerintah di berbagai level pemerintahan dalam melaksanakan perannya sebagai pembuat kebijakan, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa agar masyarakat menjadi lebih kritis dalam menyikapi implementasi kebijakan terkait pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi pengawas dari kebijakan pemerintah.

**E. Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini perlu dikemukakan sistematika penulisan agar para pembaca mampu dengan mudah dan benar dalam memahami makna yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari peneliti untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan gambaran umum dari lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, beserta analisis dan interpretasi data penelitian. Penyajian data disesuaikan dengan fokus penelitian, kemudian analisis data terkait dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan pada pokok permasalahan dan hasil analisis data

penelitian disertai dengan saran-saran sebagai bentuk sumbangan pemikiran terkait penelitian yang telah dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Gladden (1953) administrasi dapat didefinisikan sebagai organisasi dan pengarah sumber daya manusia dan sumber-sumber materi lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Lebih lanjut administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian dalam Syafri, 2012:9). Sehingga administrasi dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses usaha sekelompok orang dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Sedangkan administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988:29-30), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan (Keban, 2014: 3).



## B. Manajemen Sektor Publik

### 1. Manajemen Sektor Publik Berbasis Kinerja

Pengertian paling sederhana dari istilah manajemen adalah pengambilan keputusan Stoner dalam Domai (2013:32) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para usaha anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pengertian tersebut Stoner dan Winkel dalam Domai (2013:32) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut dikemukakan kemunculan manajemen berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi *New Public Management* yang terjadi pada negara-negara maju di Eropa dan anggota Amerika sejak tahun 1980-an. Mahmudi dalam Domai (2013:33) mengatakan beberapa pihak menyebut manajemen publik berorientasi pada hasil tersebut dengan nama *Result Oriented Management* (ROM). Maka dapat ditarik pengertian bahwa manajemen sektor publik berbasis kinerja adalah tahapan atau proses-proses manajemen organisasi yang melibatkan seluruh anggota maupun sumberdaya lainnya demi

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan berfokus pada pengukuran kinerja organisasi sektor publik itu sendiri.

## 2. Pengertian Manajemen Berbasis Kinerja

Mahmudi dalam Domai (2013:33) menjelaskan bahwa manajemen berbasis kinerja merupakan suatu metode untuk mengukur kemajuan program atau aktivitas yang dilakukan organisasi sektor publik dalam mencapai hasil atau *outcome* yang diharapkan oleh pelanggan atau stakeholder lainnya. Sejalan dengan pengertian tersebut Dharma dalam Domai (2013:34) mengatakan bahwa manajemen kinerja suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok dan individu yang digerakkan oleh para manajer. Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses yang sinergis antara manajer, individu dan kelompok dalam suatu organisasi.

Lebih lanjut dikatakan Mahmudi dalam Domai (2013:34), manajemen kinerja adalah proses yang sistematis, artinya untuk memperbaiki kinerja diperlakukan langkah-langkah atau tahap-tahap yang terencana dengan baik. Proses perbaikan kinerja bukan merupakan kerja jangka pendek, melainkan merupakan proses evolutif yang berjangka panjang. Domai (2013:34-35) menambahkan bahwa manajemen berbasis kinerja tersebut pada akhirnya akan berdampak pada perbaikan dampak budaya kerja. Demikian juga melakukan

perubahan budaya, kinerja memerlukan perencanaan yang matang, holistik dan jangka panjang.

Selanjutnya, menurut Mahmudi dalam Domai (2013:34) menyebutkan bahwa manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategik, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Data kinerja dan pelaporan kinerja merupakan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja.

### **3. Manajemen Strategis**

Menurut Pasolong dalam Domai (2013:35) manajemen strategik merupakan perpaduan antara konsep “manajemen dan strategik”, manajemen dapat diartikan sebagai proses pergerakan orang dan bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategik dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistematis dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut Yuwono dkk dalam Domai (2013:35-36) komponen utama proses manajemen strategis meliputi beberapa hal berikut:

- a. Visi adalah cita-cita akhir yang diharapkan akan tercapai di masa depan yang jauh atau kekuatan yang dapat menciptakan masa depan.

- b. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu organisasi.
- c. Tujuan adalah merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan, adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu tertentu.
- d. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan.
- e. Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman.
- f. Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah atau dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Ketujuh komponen di atas merupakan hal yang harus ada dalam sebuah organisasi pemerintahan, dimana proses manajemen strategis sangat perlu diterapkan. Adanya visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, serta kegiatan diperlukan untuk membuat keputusan ataupun tindakan apa yang perlu dikerjakan dan memberikan sebab mengapa organisasi mengerjakan hal tersebut.

### **C. Pemerintahan Desa**

#### **1. Pengertian Desa**

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” menyatakan bahwa, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Mashuri Maschab (Huda, 2015:32-33), jika membicarakan desa maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian. *Pertama*, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.

*Kedua*, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. *Ketiga*, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda (Eko, 2005 dalam Huda 2015:33).

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan ‘daerah otonom’ lainnya seperti kabupaten, karesidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional (Mashab, 2013:3).

Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Desa memiliki kewenangan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

## **2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan, bahwa Pemerintahan Desa adalah *“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Sedangkan penyelenggaraannya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif (Solekhan, 2014:51).



Dalam PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 1 ayat (6) disebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dijelaskan juga didalam PP. No. 72 Tahun 2005, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Adapun lebih jelasnya penyelenggara pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Kewajiban kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa;
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan aset desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Perangkat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilaksanakan oleh perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat desa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris

desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1) Sekretaris desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

- Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

2) Pelaksana teknis

a) Kepala urusan pemerintahan (Kaur Pem)

Tugas kepala urusan pemerintahan (Kaur Pem) adalah membantu kepala desa melaksanakan

pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. sedangkan fungsinya adalah:

- Melaksanakan administrasi kependudukan.
- Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
- Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
- Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

b) Kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan)

Tugas kepala urusan pembangunan (Kaur Pembangunan) adalah membantu perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Menyiapkan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
- Mengelola tugas pembantuan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

c) Kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (Kaur Kesra) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program kagamaan, serta melaksanakan

program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
- Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d) Kepala urusan keuangan (Kaur Keu)

Tugas kepala urusan keuangan (Kaur Keu) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. sedangkan fungsinya adalah:

- Mengelola administrasi keuangan desa.
- Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

- Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris.

e) Kepala urusan umum (Kaur Umum)

Tugas kepala urusan umum (Kaur Umum) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- Melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
- Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- Mengelola administrasi perangkat desa.

- Mengarsipkan bahan-bahan laporan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

### 3) Pelaksana kewilayahan (kepala dusun)

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- Membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
- Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- Membina swadaya dan gotong-royong masyarakat.
- Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (4).

Fungsi BPD yang berkaitan dengan kepala desa yaitu:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

**3. Administrasi Desa**

Administrasi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilaksanakan dalam rangka: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bentuk-bentuk penyelenggaraan administrasi desa, yaitu:

a. Administrasi Umum

Pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum, meliputi:

- a) Buku Peraturan Di Desa;
- b) Buku Keputusan Kepala Desa;
- c) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d) Buku Aparat Pemerintah Desa;



- e) Buku Tanah Kas Desa;
- f) Buku Tanah di Desa;
- g) Buku Agenda;
- h) Buku Ekspedisi; dan
- i) Buku Lembaga Desa dan Buku Berita Desa.

b. Administrasi Penduduk

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk, meliputi:

- a) Buku Induk Penduduk;
- b) Buku Mutasi Penduduk Desa;
- c) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d) Buku Penduduk Sementara; dan
- e) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

c. Administrasi Keuangan

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada Buku Administrasi Keuangan, meliputi:

- a) Buku APB Desa;
- b) Buku Rencana Anggaran Biaya;
- c) Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- d) Buku Kas Umum;
- e) Buku Kas Pembantu; dan
- f) Buku Bank Desa.

d. Administrasi Pembangunan

Kegiatan pencatatan data dan informasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan, meliputi:

- a) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b) Buku Kegiatan Pembangunan;
- c) Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan; dan
- d) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Administrasi Lainnya

Kegiatan pencatatan data dan informasi selain mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- a) Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
- b) Kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa; dan
- c) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

**D. Pengelolaan Keuangan Desa**

**1. Pengertian Keuangan Desa**

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Pasal 1, ayat (10), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Sedangkan pengertian hak dan kewajiban Desa terkait dengan keuangan ini adalah menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Untuk lebih detailnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

Berdasarkan pasal 72, ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pendapatan Desa bersumber dari:

- Pendapatan asli Desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- Lain-lain pendapatan Desa yang syah.

b. Belanja Desa

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, bahwa *“Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provins, dan Pemerintah”*. Kebutuhan pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan primer saja,

tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa (Solikhan, 2014:69).

## **2. Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Stoner (2006:43) pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

## **3. Azaz Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Sujarweni, 2015:27).

### **a. Transparan**

Menurut Nordiawan dalam Sujarweni (2015:28) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Menurut Mardiasmo dalam Sujarweni (2015:28) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pincipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya Nordiawan dalam Sujarweni (2015:28) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

c. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015:29) partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

#### 4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Hal ini sesuai dengan bunyi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 3 dan 4, yakni:

##### Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

##### Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

PTPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pasal 5-7, yakni:

#### Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan



- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### 5. Lingkup Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam lingkup pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pasal 1, yakni: *“Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”*.

Lebih lanjut tiap-tiap kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.



- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- 8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- 9) Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 11) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- 12) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan atau awal daripada proses pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan perencanaan yang baik maka proses pengelolaan keuangan yang baik akan tercapai.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 6) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- 7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 8) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades.
- 9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 10) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- 11) Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 12) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 13) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa.
- 14) SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- 15) Pengajuan SPP terdiri atas:
  - a) Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b) Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c) Lampiran bukti transaksi
- 16) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
  - a) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;

- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- 17) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
  - 18) Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
  - 19) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 20) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 21) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
    - a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
    - b) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
    - c) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
    - d) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - 22) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  - 23) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.
  - 24) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
  - 25) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
  - 26) Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- 5) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan:
  - a) Buku kas umum;
  - b) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - c) Buku Bank.

d. Pelaporan dan pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama; dan
  - b) Laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 5) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 6) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 7) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 8) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 9) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 10) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 11) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

- 12) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 13) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- 14) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Denzim dan Lincoln (1987) dalam Moelong (2008:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Deskriptif kualitatif dirancang untuk dapat mendeskripsikan informasi-informasi yang didapat peneliti tentang keadaan yang sebenarnya pada sebuah peristiwa yang sedang berlangsung (Sevilla, et al., 1993: 71-73).

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini guna mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang beserta mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut.

##### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang ada di dalam penelitian. Adanya fokus penelitian dapat membatasi apa saja yang akan diteliti dan mengarahkan serta mempermudah pelaksanaan penelitian. Sugiyono (2016:32) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif gejala



dari suatu obyek bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan). Peneliti kualitatif tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasar variabel, melainkan keseluruhan situasi sosial yang meliputi tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2016:207). Hal inilah yang menjadikan fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian.

Berdasarkan uraian di atas maka antara permasalahan dan fokus sangat terkait, karena peneliti akan menggunakan permasalahan penelitian sebagai dasar menentukan fokus penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang:
  - a. Tahap perencanaan
  - b. Tahap pelaksanaan
  - c. Tahap penatausahaan
  - d. Tahap pelaporan
  - e. Tahap pertanggungjawaban
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang:
  - a. Faktor pendukung
  - b. Faktor penghambat



### C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan tindakan penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan objek yang akan diamati oleh peneliti. Peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan yang sedang terjadi dari objek yang akan diteliti sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah pada Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan peneliti dalam menetapkan penelitian di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan asumsi karena:

- a. Sumber pendapatan keuangan Desa Pujonkidul telah mencapai Rp.1.575.053.610,00 pada tahun 2017.
- b. Merupakan desa dengan pendapatan asli desa tertinggi se Kabupaten Malang pada tahun 2017.
- c. Desa Pujonkidul sering dijadikan sebagai rujukan dalam pengelolaan keuangan desa oleh desa lain.

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:308) bahwa data kualitatif dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian sebagai bahan baku dalam melakukan analisis. Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*). Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber (informan) dan observasi di Desa Pujonkidul.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan dokumentasi, seperti catatan-catatan instansi yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dari data primer. Data sekunder digunakan sebagai penambah wawasan bagi peneliti untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan yang dihadapi oleh peneliti. Data sekunder didapatkan dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.

Sedangkan menurut Arikunto (2016:129) sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data memiliki pengaruh terhadap keakuratan data yang akan diperoleh dalam penelitian

dilapangan, maka sumber data haruslah akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Informan, adalah tempat peneliti bertanya guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah:
  - a) Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
  - b) Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
  - c) Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
  - d) Bapak H. Choirul Anam selaku Ketua BPD Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
  - e) Bapak Muh. Ismail Mahfudz Said selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang;
2. Peristiwa, adalah kajadian/kegiatan yang dilakukan oleh informan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Peristiwa dalam penelitian ini melihat peran apa saja yang dilakukan oleh aparat desa dalam melakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.

3. Dokumen, adalah alat pendukung data penelitian dapat berupa kertas, keterangan, arsip, pedoman dan sebagainya. Daftar dokumen yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:
  - a) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) 2017
  - b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2017
  - c) Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017
  - d) Gambaran Umum Desa 2017
  - e) Dokumen-dokumen lain terkait pengelolaan keuangan desa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sehingga cara tersebut merujuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini sependapat dengan Arikunto (2016:132-133) yang menyatakan bahwa dalam teknik pengumpulan data dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk melihat

kegiatan daripada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.

2. Wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintai informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. Informasi yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yakni pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.
3. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.

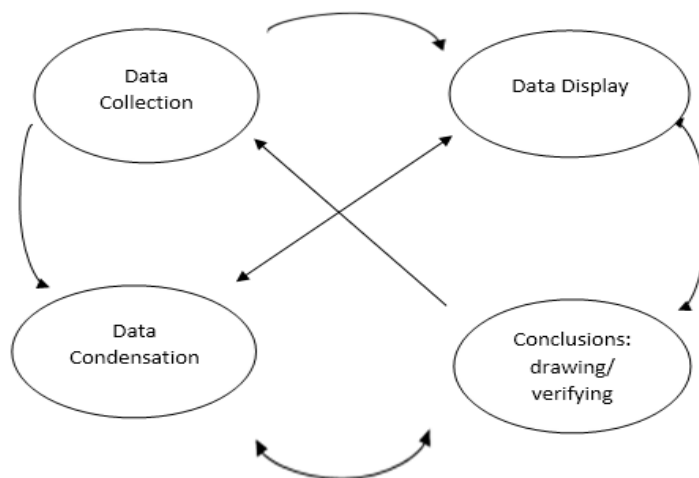
#### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016:30) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alat atau instrumen penelitian yang digunakan adalah:

1. Peneliti, dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, yang diharapkan dapat melengkapi data yang telah ditemukan mulai observasi dan wawancara.
2. Pedoman wawancara, merupakan seperangkat daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Pedoman ini berisi dengan kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok pertanyaan guna mengumpulkan data agar sesuai dengan fokus penelitian.
3. Alat dokumentasi, alat sebagai penunjang saat kegiatan penelitian berlangsung guna mendokumentasikan informasi-informasi yang didapat saat penelitian.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) yang merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Aktivitas dalam analisis dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



**Gambar 4 Komponen Analisis Data Model Interaktif**

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana, 2014

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bagaimana alur dari analisis model Miles, Huberman, dan Saldana dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data ini merupakan kegiatan mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berdasarkan fokus penelitian. Data primer berupa wawancara kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa, dan observasi pada Desa Pujonkidul. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang dikumpulkan berdasarkan kebutuhan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi Desa Pujonkidul.



## 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merupakan salah satu komponen dalam penelitian dimana peneliti melakukan pencatatan semua data yang didapat dari lapangan. Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, merorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sampai kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Kondensasi data bertujuan untuk lebih memfokuskan data-data yang didapatkan melalui proses pengumpulan data. Data wawancara dengan pihak yang terkait pengelola keuangan desa di Desa Pujonkidul dirangkum agar mempermudah dalam pembuatan laporan penelitian tanpa menghilangkan data yang ada.

## 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data ini merupakan salah satu komponen dimana bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau hanya bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif. Data disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang mempermudah dalam kegiatan analisis data. Penyajian data dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu penyajian data berisi gambaran umum Desa Pujonkidul dan penyajian data yang sesuai dengan fokus penelitian di Desa Pujonkidul.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion: Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang kegiatan pengumpulan data. Peneliti meninjau ulang temuan-temuan yang didapat untuk mencari pola, hubungan yang sama, hal-hal yang sering muncul, ataupun hal-hal yang jarang, sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Pada tahap ini data yang telah disajikan akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang digunakan peneliti. Setelah proses analisis, peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

### H. Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2011:330). Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut merupakan penjelasan macam-macam triangulasi:

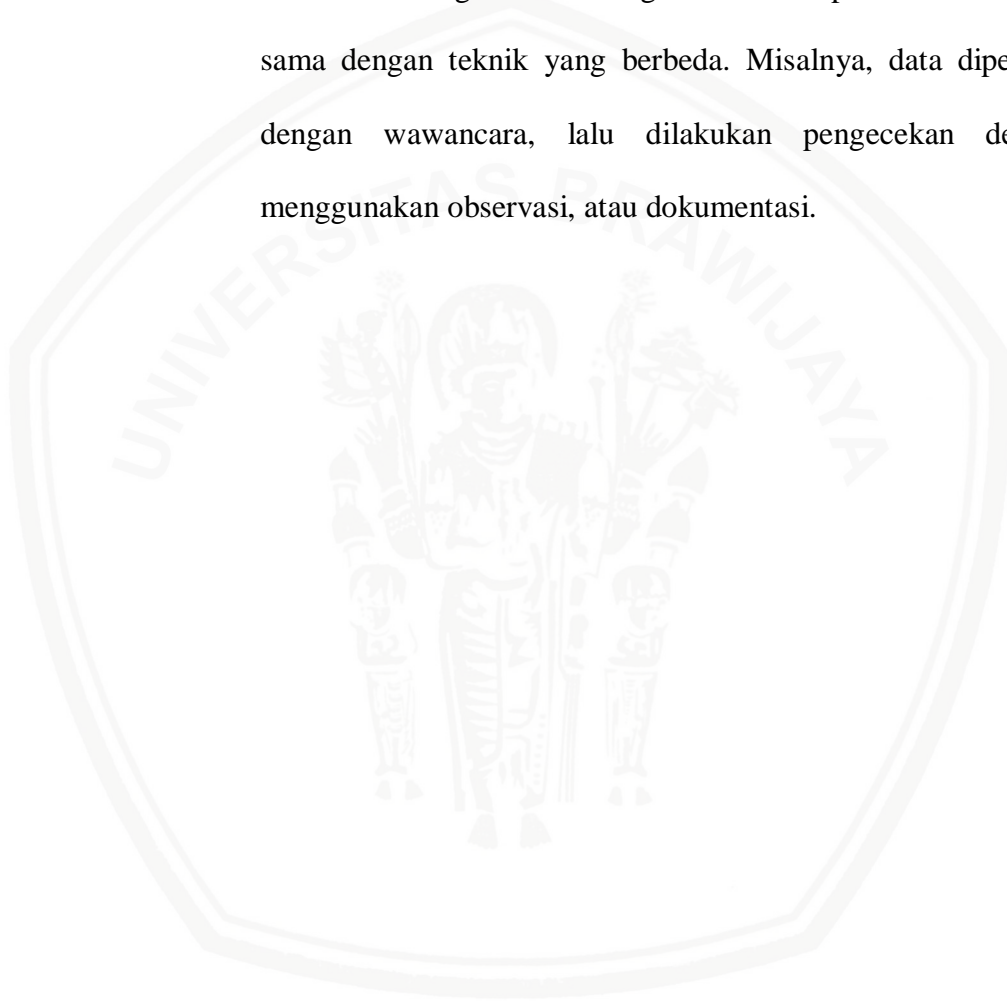
#### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data-data yang telah diperoleh melalui beberapa

sumber yang dapat mempunyai jawaban yang berbeda. Selanjutnya, data dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## 2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dilakukan pengecekan dengan menggunakan observasi, atau dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Pujon

Wilayah Kecamatan Pujon terletak  $\pm$  29 Km arah barat Ibukota Kabupaten Malang yang dikelilingi oleh perbukitan dan gunung, antara lain: Gunung Biru, Gunung Argowayang, Gunung Gentong Growah, gunung Dworowati, Gunung Kukusan, Gunung Parangklakah, Gunung Kawi, Gunung Cemoro Kandang dan Gunung Anjasmoro.

Luas wilayah Kecamatan Pujon 13.075,144 Ha / 130.76 Km, dan mempunyai ketinggian 1.100 di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kota Batu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blitar
- Sebelah Barat : Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Gambaran Umum Kecamatan Pujon 2015) 2018.

Kondisi demografis penduduk Kecamatan Pujon 64.594 jiwa terdiri dari:

- Laki-laki : 32.600 jiwa
- Perempuan : 31.994 jiwa

Dengan perkembangan penduduk rata-rata 0,1 % pertahun dan kepadatan penduduk rata-rata 210/km<sup>2</sup> dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 18.569 KK.

Kecamatan Pujon terdiri dari 10 desa dan 43 dusun/dukuh dan terperinci sebagai berikut:

**Tabel 2 Nama Desa Jumlah Dusun, RT, RW, Luas Desa**

No.	Nama Desa	Jumlah			Luas Desa (Km <sup>2</sup> )
		Dusun/Dukuh	RT	RW	
1.	Bendosari	5	23	5	3,39
2.	Sukomulyo	5	45	11	20,91
3.	Pujonkidul	3	18	9	3,28
4.	Pandesari	5	48	7	27,23
5.	Pujonlor	3	27	10	8,3
6.	Ngroto	3	33	14	11,3
7.	Ngabab	4	27	7	15,25
8.	Tawangsari	4	26	4	14,26
9.	Madirejo	7	39	11	14,54
10.	Wiyurejo	4	22	7	12,3
Jumlah		43	308	85	130,76

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Gambaran Umum Kecamatan Pujon 2015) 2018.

Letak geografis dan bentuk wilayah sangat berpengaruh pada produktifitas tanah di wilayah Kecamatan Pujon yang menghasilkan hasil bumi (sayur mayur) yang sangat berpotensi dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah Sawah : 910,10 Ha
- Tanah Tegalan : 2.276,00 Ha
- Tanah Perkebunan : 14,00 Ha
- Tanah Hutan : 21.671,00

- Lain-lain : 48,55 Ha

Sesuai dengan potensi wilayah Kecamatan Pujon, maka andalan perekonomian masyarakat Pujon adalah hasil pertanian (sayur mayur) didukung oleh peran serta Gapoktan dan kelompok tani, serta hasil peternakan yaitu susu sapi segar dengan rata-rata hasil 155 ton / 95.000 liter susu sapi per-hari yang tergabung dalam wadah Koperasi SAE yang bergerak di bidang persusuan dan KUD BAIK di bidang pertanian.

## **2. Gambaran Umum Desa Pujonkidul**

Secara geografis Desa Pujonkidul terletak pada posisi  $7^{\circ}21'$ - $7^{\circ}31'$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}10'$ - $111^{\circ}40'$  Bujur Timur. Topografi ketinggian desa adalah berupa perbukitan atau pergunungan yaitu sekitar 1.200 m di atas permukaan air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pujonkidul rata-rata mencapai 2.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 1.200 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2011-2016.

Secara administratif, Desa Pujonkidul terletak di wilayah Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Pujonlor. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukomulyo. Di sisi selatan berbatasan dengan Hutan Perhutani, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Pujonlor dan Perhutani Kecamatan Pujon.

Jarak tempuh Desa Pujonkidul ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 37 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam.

#### a. Sejarah Desa

Desa Pujonkidul merupakan salah satu dari sepuluh desa yang terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Berikut merupakan sejarah masa kepemimpinan di Desa Pujonkidul:

**Tabel 3 Masa Kepemimpinan Kepala Desa**

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	Jaeng Retno	1901	1915
2	Jaeng Retno	1915	1925
3	Rateno	1925	1945
4	Saeru	1945	1978
5	Admadihardjo	1979	1980
6	Painu	1980	1983
7	Djuma'i	1983	1993
8	Sugiono	1993	1994
9	Siti Nurjana	1994	2000
10	Jamludin	2000	2001
11	Sugiono	2001	2011
12	Udi Hartoko	2011	2017
13	Udi Hartoko	2017	2023

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

#### b. Kondisi Geografis

Wilayah Desa Pujonkidul terletak pada wilayah dataran tinggi dengan kordinat antara 7°21`-7°31` Lintang Selatan dan 110°10`-



111°40' Bujur Timur, dengan luas 330.245 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Pujonlor
- Sebelah Timur : Desa Pandensari
- Sebelah Selatan : Hutan Perhutani
- Sebelah Barat : Desa Sukomulyo

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Pusat Pemerintahan Desa Pujonkidul terletak di Dusun Krajan RT 03 RW 02 dengan menempati areal lahan seluas 812m<sup>2</sup>.



**Gambar 5 Peta Desa Pujonkidul**

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Peta Pujonkidul) 2018.

### c. Kondisi Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Pujonkidul adalah 4.146 jiwa yang berada dalam 1.323 KK, dengan rincian 2.115 laki-laki dan 2.084 perempuan.

Berikut ini merupakan informasi penduduk berdasarkan klasifikasi umur yang dibuat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

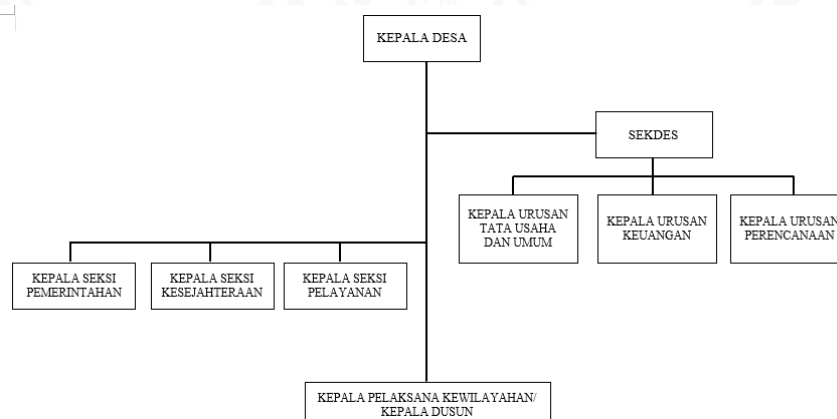
No.	Rentang Umur	Jumlah Penduduk
1.	Umur 0-5	324 orang
2.	Umur 6-12	461 orang
3.	Umur 13-17	347 orang
4.	Umur 18-45	2023 orang
5.	Diatas 45	1316 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>4471 orang</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif 18-45 tahun Desa Pujon Kidul sejumlah 2023 atau 45%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

#### d. Struktur Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa tanggal 03 Januari. Organisasi Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Desa Pujonkidul sendiri dibagi menjadi 3 wilayah dusun, yaitu:

Dusun Krajan dengan 11 (sebelas) RT dalam 6 (enam) RW; Dusun Maron dengan 5 (lima) RT dalam 2 (dua) RW; dan Dusun Tulungrejo dengan 2 (dua) RT dalam 1 (satu) RW.

Desa Pujonkidul juga memiliki visi & misi tersendiri yakni:

### Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa Pujon Kidul yang GUYUB RUKUN”

(Gotong royong, Usaha, Yakin, Ulet, Bertaqwa, Rukun, Kreatif, Unggul,)

*Untuk mewujudkan masyarakat yang **Guyub**, diperlukan kesadaran untuk **gotong royong**, sehingga **Usaha** yang dirintis, dengan penuh **keyakinan**, serta **ulet** yang dimiliki masing-masing warga, yang berlandaskan **taqwa** kepada Tuhan YME. Dengan bermodalkan **rukun** (bersatu), baik rukun antar warga, keluarga serta pihak pemerintah desa yang dibarengi kinerja handal tanpa putus asa.*

***Kreatifitas** dan kerjasama antara warga juga pemerintah desa, mutlak dibutuhkan guna mewujudkan cita-cita kita bersama menjadikan Desa Pujon Kidul menjadi desa **unggul** yang selalu berprestasi yang memegang falsafah jawa:*

*”toto, titi, tentrem, kerto tur raharjo”.*

*”Baldatun toyyibatun warobbun ghofur.”*

### Misi

1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya.
2. Mewujudkan pemerintahan *bersih dan berwibawa* (tata kelola pemerintahan yang baik, (ex:pendataan aset desa beserta pemanfaatannya), berkeadilan, dan demokratis (ex: rembuk desa, sebagai landasan musyawarah mufakat).

3. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum muda di dalam berperan aktif kegiatan desa.
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian, peternakan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana).
7. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa.
8. Peningkatan kesejahteraan sosial.

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Visi dan Misi diatas merupakan impian dan strategi yang ingin dicapai oleh para aparat desa dalam melaksanakan pemerintahan pada Desa Pujonkidul.

Berikut merupakan data perangkat Desa Pujonkidul:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1) Kepala Desa        | : Udi Hartoko              |
| 2) Sekretaris Desa    | : Sudirman                 |
| 3) Kasun Dukuh Krajan | : Ahmad Imam               |
| 4) Kasun Dukuh Maron  | : Suhartono                |
| 5) Kasun Tulungrejo   | : Kusnin                   |
| 6) Kasi Pemerintahan  | : Muh. Ismail Mahfudz Said |
| 7) Kasi Pembangunan   | : Nurahmad                 |
| 8) Kaur Kesra         | : Ponari                   |
| 9) Kaur Umum          | : Asmawi                   |
| 10) Kaur Keuangan     | : Anas Taufiq              |

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

#### e. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Pujonkidul adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, dan berternak (sapi, kambing, ayam, dan itik), perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Pujonkidul 65% merupakan persawahan.

**Tabel 5 Mata Pencaharian Penduduk**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pertanian	1.926 jiwa
2.	Peternakan	1.612 jiwa
3.	Perdagangan	37 jiwa
4.	Pertukangan	24 jiwa
5.	Ketrampilan	4 jiwa
6.	Jasa lain-lain	17 jiwa

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Terlihat dari data di atas bahwa mata pencaharian dalam bidang pertanian memiliki jumlah jiwa terbanyak, yakni 1.926 jiwa. Diikuti dengan bidang peternakan yakni 1.612 jiwa. Secara umum masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dengan menanam padi menggunakan cara yang sederhana dan konvensional.

Namun, hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendala utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi dan serangan hama wereng, ingser, sundep, tikus, banjir, dll.

#### f. Perekonomian

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan peternakan. Secara umum jumlah angkatan kerja (penduduk usia 15-55 th) sejumlah 1.875 jiwa, dengan perincian jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun yang masih sekolah adalah 56 jiwa. Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun yang menjadi ibu rumah tangga adalah 361 jiwa. Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun pekerja penuh adalah 862 jiwa. Jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun yang tidak menentu adalah 286 jiwa.

Data lain menunjukkan jumlah rumah tangga petani adalah 1.102 KK, dengan jumlah anggota rumah tangga petani adalah 695 jiwa. Sedangkan jumlah rumah tangga buruh tani adalah 317 KK, dengan jumlah anggota rumah tangga buruh tani adalah 886 jiwa. (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

#### g. Pendidikan

**Tabel 6 Sarana Pendidikan**

No.	Gedung Pendidikan	Jumlah Gedung
1.	TK/PAUD	3 buah
2.	SD	2 buah
3.	SMP	1 buah
4.	SMA	- buah
5.	Madrasah Diniyah	2 buah

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Pendidikan merupakan salah satu modal penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada Desa Pujonkidul sendiri

telah tersedia sarana pendidikan dimulai dari tingkat TK/PAUD hingga SMP. Namun untuk sarana pendidikan tingkat SMA masih belum tersedia di Desa Pujonkidul, sementara untuk mendapatkan sarana tingkat SMA tersebut masyarakat desa harus menuju tempat lain yang relatif lebih jauh.

Minimnya sarana pendidikan juga akan berdampak kepada kualitas pendidikan daripada sumber daya manusia yang ada. Berikut data tingkat pendidikan daripada masyarakat Desa Pujonkidul:

**Tabel 7 Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	21 Jiwa
2.	Tamat SD/Sederajat	1.294 Jiwa
3.	Tamat SMP/Sederajat	227 Jiwa
4.	Tamat SMA/Sederajat	96 Jiwa
5.	D-1	4 Jiwa
6.	D-2	2 Jiwa
7.	D-3	2 Jiwa
8.	S-1	3 Jiwa

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pujonkidul hanya mampu menyelesaikan pendidikan pada tingkat SD. Sehingga menjadikan Desa Pujonkidul kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas.

Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Pujonkidul tidak terlepas dari minimnya sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia, selain juga faktor ekonomi dan cara pandang hidup masyarakat desa. Sehingga persoalan tingkat pendidikan masyarakat ini merupakan salah



satu permasalahan yang sedang diselesaikan oleh Pemerintahan Desa Pujonkidul.

#### **h. Kesehatan**

Kesehatan merupakan aset yang penting bagi masa depan suatu masyarakat. Masyarakat yang sehat secara fisik dan sehat secara mental merupakan syarat masyarakat yang produktif secara umum. Selain itu, faktor prasarana dan kondisi lingkungan juga akan mempengaruhi daripada produktifitas masyarakat.

Aset prasarana yang tersedia di Desa Pujonkidul dirasa cukup memadai, diantaranya adalah:

**Tabel 8 Aset Prasarana Kesehatan**

No.	Aset Prasarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	5 buah
2.	Polindes	2 buah
3.	Sarana Air Bersih	5 buah
4.	Mobil Desa Siaga	1 unit

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen RKP Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Selain adanya aset prasarana kesehatan pada tabel diatas. Dalam hal kualitas balita, dari jumlah 410 balita di tahun 2017, keseluruhan 410 balita dengan gizi baik, sehingga 0 balita dengan gizi buruk. Hal ini juga didukung dengan adanya 2 (dua) orang bidan di Desa Pujonkidul.

### **B. Penyajian Data Penelitian**

#### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana Raperdes APBDes ini disepakati bersama pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Raperdes APBDes yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, sehingga Peraturan Desa (Perdes) APBDes berlaku.

Proses perencanaan sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...BPD, LPMD, masyarakat terlibat. Jadi ketika musrenbangdes yang memimpin rapat itu BPD. Saya hanya

menyampaikan ini visi misi desa, ini usulan masyarakat. Jadi mensinergikan usulan masyarakat dengan visi misi desa. Tahun 2014 itu kita sudah melakukan *mapping* pemetaan, dimana masyarakat mengusulkan, di RKPDes itu semua usulan masyarakat. Tolong disinergikan dengan visi misi desa. BPD yang mimpin rapat”. (wawancara dengan Bapak Udi Hartono selaku Kepala Desa Pujonkidul di Balai Desa Pujonkidul pada Selasa, 5 Juni 2018, pukul 10.40 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul terkait dengan tahap perencanaan dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan desa, dengan mengadakan musyawarah tingkat desa, dimana sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah pada tingkat RT yang berlanjut pada tingkat dusun. Hasil daripada musyawarah desa adalah dokumen RKPDes dan APBDes oleh BPD.

Ditemui pada waktu dan tempat yang berbeda, peneliti mewancarai Ketua BPD untuk mendapatkan penjelasan lain tentang tahapan perencanaan. Hal itu dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...ya mas, pada saat rapat, musyawarah desa selain pemerintah desa dan BPD kita libatkan juga dari unsur masyarakat, LPMD, PKK, tokoh-tokoh masyarakat. agar ikut partisipasi pada kegiatan desa ini. Agar masyarakat desa juga tahu, uang desa ini untuk apa saja, apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di desa.” (wawancara dengan Bapak H. Choirul Anam selaku Ketua BPD Desa Pujonkidul di Desa Pujonkidul pada Rabu, 8 Juni 2018, pukul 09.20 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Pujonkidul bahwa dalam tahap perencanaan terdapat kegiatan musyawarah desa. Pada musyawarah desa yang dilaksanakan

melibatkan aparat pemerintah desa, BPD, LPMD, PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat desa di Desa Pujonkidul. Pada musyawarah desa tersebut diharapkan semua yang hadir menjadi mengetahui keuangan desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan apa saja di Desa Pujonkidul.

Ditemui pada waktu dan tempat yang berbeda, peneliti mewawancarai Sekretaris Desa untuk mengetahui tahapan musyawarah sehingga menghasilkan produk RKPDes dan APBDes. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...jadi RKPDes itu turunan dari RPJMDes mas. Sebelum kita menyusun RKPDes kita ada musyawarah dulu, masyarakat kita libatkan disitu bersama BPD juga. Tapi, tetap berpedoman pada RPJMDes yang sudah ada. Sebelumnya sudah ada omongan dari tingkat RT, terus naik-naik sampai tingkat desa. Selanjutnya, dari RKPDes tadi baru disusun yang namanya RAPBDes, lanjut APBDes.” (wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul di Kantor Desa Pujonkidul pada Kamis, 7 Juni 2018, pukul 09.10 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pujonkidul bahwa dalam proses penyusunan RKPDes pemerintah desa juga turut melibatkan masyarakat dan BPD. Melibatkan lembaga desa dan unsur masyarakat disini termasuk dalam penerapan asas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Pada tahap perencanaan ini adalah Perdes APBDes sebagai produk akhir tahapan ini. Sebelumnya telah disusun RKPDes sebagai acuan. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disebut

RKPDDes adalah penjabaran daripada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tindak lanjut daripada RKPDDes ataupun pelaksanaannya melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

**Tabel 9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	
	Pendapatan Asli Desa	85.000.000,00
	Pendapatan Transfer	1.380.761.919,00
	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	31.500.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.497.261.919,00</b>
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	491.553.500,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	643.516.750,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	146.450.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	202.050.677,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.483.570.927,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>13.690.992,00</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
	Penerimaan Pembiayaan	36.309.008,00
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-13.690.992,00</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen APBDesa Pujonkidul 2017) 2018.

Berdasarkan tabel di atas, pada APBDes tahun 2017 Desa Pujonkidul memiliki pendapatan sebesar Rp.1.497.261.919,00; yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.491.553.500,00; bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.643.516.750,00; bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.146.450.000,00; serta bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.202.050.677,00. Sedangkan

pada pembiayaan terdapat penerimaan sebesar Rp.36.309.008,00; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,00. Sehingga tidak terdapat sisa lebih ataupun kekurangan pada perhitungan anggaran tersebut.

Berikut merupakan data rincian pendapatan yang didapatkan Desa Pujonkidul pada anggaran tahun 2017:

**Tabel 10 Pendapatan APBDesa Pujonkidul Tahun 2017**

URAIAN	ANGGARAN
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.497.261.919,00</b>
<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>85.000.000,00</b>
<b>Hasil Usaha Desa</b>	<b>85.000.000,00</b>
Hasil Usaha Desa Lainnya	85.000.000,00
Kafe sawah	75.000.000,00
Restribusi Sampah dari Masyarakat	10.000.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.380.761.919,00</b>
<b>Dana Desa</b>	<b>1.349.644.419,00</b>
Dana Desa	1.349.644.419,00
Dana Desa	832.972.000,00
Anggaran Dana Desa	491.651.000,00
Bagi hasil pajak	20.566.050,00
Restribusi	4.455.369,00
<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>31.117.500,00</b>
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten	31.117.500,00
bantuan keuangan Pilkades tahun 2017	31.117.500,00
<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>31.500.000,00</b>
<b>Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>31.500.000,00</b>
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	31.500.000,00
Surplus Eks PNPM	31.500.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.497.261.919,00</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen APBDesa Pujonkidul 2017) 2018.

Pada tabel diatas bahwa jumlah pendapatan dalam APBDesa Pujonkidul tahun 2017 adalah sebesar Rp.1.497.261.919.00. Sumber dari pendapatan tersebut adalah diantaranya berasal dari pendapatan asli desa yaitu hasil usaha desa



yang bersumber pada kafe sawah sebesar Rp.75.000.000,00 dan restribusi sampah dari masyarakat sebesar Rp.10.000.000,00. Sumber pendapatan kedua adalah pendapatan transfer yang berasal dari dana desa dan bantuan keuangan kabupaten. Dana desa sebesar Rp.1.349.644.419,00. Sedangkan bantuan keuangan dari kabupaten sebesar Rp.31.117.500,00. Lain-lain pendapatan desa yang sah berasal dari surplus eks PNPM sebesar Rp.31.500.000,00.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data pendukung yang didapat, peneliti menyimpulkan bahwa secara bertahap pada perencanaan telah melaksanakan asas transparan dan partisipatif, dimana telah melibatkan unsur masyarakat melalui musrenbangdes dengan produk hasilnya adalah APBDes Pujonkidul tahun 2017.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa berdasarkan pada RKPDDes dan APBDes yang telah disepakati dan disetujui oleh BPD. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapatkan verifikasi dari sekretaris desa dan mendapat persetujuan kepala desa, selanjutnya bendahara desa memberikan biaya yang diminta dengan dipotong pajak, yang nantinya akan disetorkan kepada kas



negara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

“...disini kita pakai format surplus defisit mas. Maksudnya itu kan semuanya ada RAB, setelah RAB dicek dan disahkan kepala desa. maka pelaksana kegiatan bertanggungjawab penuh pada pengeluarnya. Nanti setelah belanja barang atau jasa, SPP baru disampaikan”. (wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di Kantor Desa Pujonkidul pada Kamis, 7 Juni 2018, pukul 10.20 WIB).

Menurut hasil wawancara dengan bendahara Desa Pujonkidul bahwa pada tahap pelaksanaan untuk semua pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya). RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan kemudian disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya, pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada kepala desa setelah diterima barang atau jasa. Hal di atas didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau di pelaksanaan secara garis besar tugas saya ada dua mas, sebelum dan sesudah. Pertama, yang verifikasi RAB. Kedua, setelah barang atau jasa diterima saya cek berkas-berkas. Pelaksana kegiatan memberikan SPP, pertanggungjawab belanja, juga lampiran bukti transaksi. Kalau sudah, lanjut ke bendahara. (wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul di Kantor Desa Pujonkidul pada Kamis, 7 Juni 2018, pukul 09.10 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bendahara baru melakukan pembayaran setelah pelaksana kegiatan menerima barang atau jasa yang dilanjutkan dengan menyerahkan bukti-bukti

berupa SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi yang lebih dulu diperiksa oleh sekretaris desa.

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dilaksanakan berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Sehingga kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut merupakan salah satu RAB yang dilaksanakan di Desa Pujonkidul.

**Tabel 11 RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana**

URAIAN		ANGGARAN
<b>BELANJA</b>		
	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 8.260.000,00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	Rp 8.260.000,00
	<i>rehab gedung pertemuan PKK (keramik) 40 m2</i>	<i>Rp 6.580.000,00</i>
	<i>rehab gedung (kusen)</i>	<i>Rp 1.680.000,00</i>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.260.000,00</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen RAB Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui salah satu pengeluaran keuangan desa yakni dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana desa.

Berikut ini merupakan rincian belanja APBDesa Pujonkidul tahun 2017 yang digunakan sebagai acuan daripada Rencana Anggaran Biaya perkegiatan di Desa Pujonkidul pada tahun 2017:

Tabel 12 Rincian Belanja APBDesa Pujonkidul Tahun 2017

URAIAN	ANGGARAN (Rp)
<b>BELANJA</b>	<b>1.563.824.066,00</b>
<b><u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u></b>	<b><u>444.324.000,00</u></b>
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	217.728.000,00
Kegiatan Operasional Kantor Desa	102.428.500,00
Kegiatan Operasional BPD	23.000.000,00
Kegiatan Operasional RT/RW	33.600.000,00
Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	8.200.000,00
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa	6.000.000,00
Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi APBDes Semester I	0,00
Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Dana Desa (APBN)	0,00
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	53.367.500,00
<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>738.883.889,00</u></b>
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	533.566.889,00
Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	205.317.000,00
<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>167.170.500,00</u></b>
Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	13.870.500,00
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	3.500.000,00
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK	45.950.000,00
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	96.450.000,00
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	7.400.000,00
<b><u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</u></b>	<b><u>213.445.677,00</u></b>
Kegiatan Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	0,00
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	57.610.000,00
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	5.400.000,00
Kegiatan Pengelolaan Transportasi Desa	6.000.000,00
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	26.500.000,00
Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Usha Pertanian	0,00
Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup	108.320.000,00
Kegiatan Penyusunan Profil Desa/Data Desa/Peta Aset Desa	4.875.000,00
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	4.740.677,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.563.824.066,00</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen APBDesa Pujonkidul 2017) 2018.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa total jumlah belanja desa sebesar Rp.1.563.824.066,00 dengan rincian untuk kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp.444.324.000,00. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.738.883.889,00. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.167.170.500,00.

Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.213.445.677,00.

Ditemui pada waktu dan tempat yang berbeda, peneliti mewawancarai PTPKD untuk mengetahui lebih dalam mengenai tahap pelaksanaan ini. Berikut hasil wawancara:

“Ketika pelaksanaan kegiatan, kami selalu berusaha melibatkan masyarakat, paling tidak pas teknisnya. Ketika kegiatan dilapangan kami ada papan info, kegiatan apa dan berapa dana yang digunakan. Tapi, yang biasanya sering terlewat adalah dokumentasi pelaksanaan, tahap-tahapan pelaksanaan, kadang kurang lengkap mas...”. (wawancara dengan Bapak Muh. Mahfud Said Ismail selaku PTPKD Desa Pujonkidul di Kantor Desa Pujonkidul pada Jumat, 22 Juni 2018, pukul 09.05 WIB).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data pendukung yang didapat, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul dilaksanakan dengan baik menyesuaikan rencana anggaran belanja (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan telah melaksanakan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, penerapan asas akuntabel terkadang masih terdapat kekurangan dari segi administrasi seperti pada kelengkapan dokumentasi kegiatan.

#### **c. Tahap Penatausahaan**

Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan ini merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan

kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

“Penatausahaannya setiap bulan, mencatat masuk keluarnya keuangan. Tiap bulannya laporan ke kepala desa. Syukur mas, di desa ini termasuk tertib, PTPKD lapornya tertib. Jadi, penatausahaan terbantu, ikut tertib, pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu saya juga terbantu adanya siskeudes...”. (wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di kantor desa pada Jumat, 22 Juni 2018 jam 10.00).



**Gambar 7 Tampilan Depan Aplikasi SISKEUDES**

Sumber: Data Primer hasil observasi penelitian 2018.

Gambar diatas merupakan tampilan depan dari aplikasi SISKEUDES. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Ditemui pada waktu dan tempat yang berbeda, peneliti mewawancarai kepala desa tentang kegiatan penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa.



“Desa Pujonkidul ini termasuk tertib panatausahaan. Saya pantau keuangannya ke bendahara tiap bulan, keluarnya berapa, dan dipakai untuk apa saja...”. (wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 9.10).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan di Desa Pujonkidul oleh bendahara desa dilakukan rutin setiap bulan. Penatausahaan berjalan dengan baik karena kerjasama sinergis antara bendahara desa, kepala desa, dan PTPKD.

#### **d. Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Pelaporan berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul mengenai kegiatan pelaporan.

“Kemarin pelaporannya baik, sudah kita laporkan. Terserap 100%. Bulan Juli, tidak sampai molor. Laporan ini sebagai bentuk bertanggungjawaban desa terhadap yang memberi dana”. (wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 9.10).

Untuk mendapatkan penjelasan lebih, peneliti mewawancarai Bendahara Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pujonkidul.

“...pelaporan itu saya tinggal menyesuaikan dengan apa yang dilaporkan dari PTPKD. Jadi, berapa-berapanya, sumber dananya apa, kita sendirikan. Selanjutnya kita masukkan ke sistem, selesai. Kemarin terserap 100% dana secara keseluruhan.”

(wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 10.20).

Pelaporan pengelolaan keuangan desa dilaporkan oleh Kepala Desa Pujonkidul kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Adapun data pelaporan keuangan Desa Pujonkidul sebagai berikut.

**Tabel 13 Laporan Realisasi Pelaksanaan ABPDesa Pujonkidul 2017**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	<b>PENDAPATAN</b>				
	Pendapatan Asli Desa	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	100,0%
	hasil usaha desa	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	100,0%
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.383.515.058,00</b>	<b>1.381.053.610,00</b>	<b>2.461.448,00</b>	<b>99,8%</b>
	dana desa	831.968.000,00	831.968.000,00	0,00	100,0%
	bagi hasil pajak dan retribusi	29.462.558,00	27.001.110,00	2.461.448,00	91,6%
	alokasi dana desa bantuan keuangan kabupaten/kota	490.967.000,00	490.967.000,00	0,00	100,0%
	Lain-lain	31.117.500,00	31.117.500,00	0,00	100,0%
	<b>Pendapatan Desa yang Sah</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.577.515.058,00</b>	<b>1.575.053.610,00</b>	<b>2.461.448,00</b>	<b>99,8%</b>
2	<b>BELANJA</b>				
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	444.324.000,00	420.683.187,00	23.640.813,00	94,7%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	738.883.889,00	668.013.757,00	70.870.132,00	90,4%
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	167.170.500,00	160.857.090,00	6.313.410,00	96,2%
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	213.445.677,00	195.560.586,00	17.885.091,00	91,6%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.563.824.066,00</b>	<b>1.445.114.620,00</b>	<b>118.709.446,00</b>	<b>92,4%</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>13.690.992,00</b>	<b>129.938.990,00</b>	<b>116.247.998,00</b>	



3	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	36.309.008,00	36.309.008,00	0,00	100,0%
	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,0%
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-13.690.992,00</b>	<b>-13.690.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>116.247.998,00</b>	<b>- 116.247.998,00</b>	<b>7,4%</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah (Dokumen Laporan Realisasi APBDesa Pujonkidul 2017) 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada anggaran pendapatan sebesar Rp.1.577.515.058,00. Namun, realisasi anggaran hanya sebesar Rp.1.575.053.610,00. Maka terdapat selisih lebih sebesar Rp.2.461.448,00 atau realisasinya hanya sebesar 99,8% dari anggaran. Sedangkan anggaran belanja sebesar Rp.1.563.824.066,00. Namun, realisasi anggaran belanja hanya sebesar Rp.1.445.114.620,00. Maka terdapat selisih lebih sebesar Rp.118.709.446,00 atau realisasinya hanya sebesar 92,4% dari anggaran belanja. Sehingga jika dihitung terdapat selisih sisa lebih sebesar Rp.116.247.998,00 atau sebesar 7,4% dari APBDesa Pujonkidul Tahun Anggaran 2017 tidak terserap.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data pendukung, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan disampaikan oleh kepala desa dalam bentuk 2 (dua) laporan semester, yakni semester awal dan semester akhir dengan sesuai prosedur. Pada saat penelitian dilakukan, pelaporan sudah

dilaksanakan hingga laporan realisasi semester akhir dengan anggaran yang terserap mencapai 92,6% untuk Desa Pujonkidul.

**e. Tahap Pertanggungjawaban**

Tahap pertanggungjawaban merupakan kegiatan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri, diantaranya; format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes; format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember; dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul.

“...pertanggungjawaban saya yang menyampaikan melalui camat kepada bupati. Formatnya sudah ada, kita tinggal ikuti. Selain itu kita juga mesti bertanggungjawab ke desa, masyarakat disitu. Kita mesti sampaikan ke masyarakat dengan media informasi.” (wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 9.10).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pertanggungjawaban disampaikan kepada bupati melalui camat. Selain itu pertanggungjawaban juga dilakukan kepada desa ataupun unsur masyarakat di dalamnya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih, peneliti mewawancarai Bendahara Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pujonkidul.

“...dari setiap kegiatan ada laporan pertanggungjawaban, dapat dipelajari atau dijadikan bahan evaluasi juga. Pada kegiatan pertanggungjawaban saya tinggal menyusunnya, kan laporan pertanggungjawaban per kegiatan sudah ada, saya tinggal menyusunnya sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Selain itu pertanggungjawaban kita juga sampaikan ke desa, masyarakat dengan memberikan papan baliho, isinya penggunaan keuangan desa itu...”. (wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 10.20).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Bendahara Desa Pujonkidul dengan menyusun laporan pertanggungjawaban per kegiatan sesuai dengan format aturan atau pedoman laporan pertanggungjawaban yang melandasinya. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Adapaun bentuk pertanggungjawaban kepada desa dilakukan dengan media informasi seperti berikut.

SELANJA	
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 830.888.500,00
Pembinaan Tataatan Pemerintahan	Rp. 222.384.000,00
Operasional Pemerintahan	Rp. 130.268.000,00
Operasional BPD	Rp. 23.600.000,00
Operasional Badan Pertanggungjawaban Warga	Rp. 11.250.000,00
Pengembangan Masyarakat Desa	Rp. 6.000.000,00
penyusunan pembangunan	Rp. 2.000.000,00
Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Akhir	Rp. 21.117.500,00
Pemilihan Kepala Desa	Rp. 22.250.000,00
Pemilihan Kepala Desa	Rp. 285.385.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 27.850.000,00
Drainase cor RT 04/02	Rp. 3.150.000,00
Peninggihan TPT RT 09/02	Rp. 3.500.000,00
Penerangan Jalan RT 15/08	Rp. 58.840.000,00
Rabat Beton RT 18/09	Rp. 24.855.000,00
Rabat beton RT 11	Rp. 15.215.000,00
Rabat Beton RT 10/05	Rp. 74.975.000,00
Drainase cor RT 06/03	Rp. 61.225.000,00
Drainase cor RT 03/02	Rp. 14.705.000,00
TPT RT 02	Rp. 2.570.000,00
Rabat Beton RT 07	Rp. 2.260.000,00

**Gambar 8 Baliho Informasi Penggunaan APBDesa Pujonkidul 2017**  
Sumber: Data Primer hasil observasi penelitian 2018.

Gambar di atas merupakan salah satu baliho sebagai media informasi untuk menyampaikan penggunaan daripada APBDesa Pujonkidul tahun 2017. Media informasi tersebut ada di titik-titik strategis di desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Pujonkidul.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan data pendukung yang didapat, peneliti menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa Pujonkidul dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Format laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang melandasinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga telah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Pujonkidul.

## **2. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul**

Pada pelaksanaan suatu kegiatan sudah menjadi hal pasti terdapat faktor pendukung di dalam kegiatan tersebut. Faktor pendukung sendiri merupakan hal-hal yang menjadikan berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya pada suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul yang memiliki faktor pendukung pada kegiatannya. Selanjutnya untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung daripada pengelolaan keuangan desa

di Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul.

“Kalau saya rasa, karena dari awalnya turun kebijakan sudah cukup jelas. Jadi, dasar hukum kegiatannya itu jelas, sampai peraturan paling bawah. Saya rasa dasar hukumnya jelas, ketentuannya jelas, pedoman jelas. Sehingga tugas-tugas pun jelas, apa dan bagaimana kita mesti bekerja. Selain itu, sumber anggaran juga. Kalau sumber anggaran jelas, kan enak kita untuk merencanakannya, tidak bingung dananya berapa. Masyarakat juga sama-sama tau, ikut belajar. Mereka mulai mengerti tahapan-tahapan atau alur-alur pengelolaan keuangan desa. mereka tidak berfikir, uang desa banyak ini. Sudah tidak”. (wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 9.10).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kepala Desa Pujonkidul merasa yang menjadi faktor pendukung daripada pengelolaan keuangan desa sendiri yakni, dasar hukum yang jelas diikuti tugas-tugas yang jelas pula; kejelasan sumber anggaran keuangan yang memudahkan sebuah perencanaan; dan adanya pemahaman masyarakat yang ingin mulai mengerti alur daripada pengelolaan keuangan desa.

Untuk mendapatkan pendapat lain, peneliti mewawancarai Bendahara Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pujonkidul.

“...kalau pendukung, menurut saya, terutama yang berhubungan langsung dengan tugas saya. Pertama itu kejelasan peraturan dari pada pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, karena peraturan jelas, diikuti dengan apa dan bagaimana tugas-tugas kita. Selain itu, adanya sistem baru ini juga mendukung tugas saya sebagai bendahara desa. sistem siskeudes mas.” (wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 10.20).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa menurut Bendahara Desa Pujonkidul, yang menjadi faktor pendukung adalah adanya kejelasan

peraturan, kejelasan tugas, dan adanya sistem siskeudes yang membantu tugas daripada Bendahara Desa Pujonkidul.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Pujonkidul untuk memperoleh pendapat tambahan mengenai faktor pendukung daripada pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pujonkidul.

“...untuk faktor pendukung, kejelasan peraturan itu penting. Sehingga kita punya pedoman bagaimana kita mengambil tindakan, apa yang perlu dilakukan, seperti apa dan seterusnya. Sehingga pelaksana pengelolaan keuangan desa itu mengerti tugas-tugasnya. Kalau tau tugas dan kewajiban kan sama-sama enak. Selanjutnya, masyarakat juga berperan penting, partisipasi dari mereka utamanya. Ketika mereka partisipasi aktif, kita enak kerjanya. Terlebih sekarang sudah ada WA, jadi kalau ada apa-apa kita tinggal sebar via WA, lebih cepat.” (wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekretaris Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Selasa, 26 Juni 2018 jam 8.30).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa Sekretaris Desa Pujonkidul merasa apa yang menjadi faktor pendukung daripada pengelolaan keuangan desa adalah adanya kejelasan peraturan, PTPKD yang mengerti tugas dan kewajibannya, partisipasi masyarakat, dan adanya media WA (*WhatsApp*).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi faktor pendukung daripada pengelolaan keuangan desa adalah, diantaranya: dasar hukum atau peraturan yang jelas; tugas dan kewajiban PTPKD yang jelas; kepastian dan kejelasan sumber anggaran dana; tingkat partisipasi masyarakat; adanya media komunikasi WA (*WhatsApp*); dan adanya sistem siskeudes.



### 3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul

Pada pelaksanaan suatu kegiatan sudah menjadi hal pasti terdapat faktor penghambat di dalam kegiatan tersebut. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan memperlambat sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Begitu juga dengan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul yang memiliki faktor penghambat pada kegiatannya. Selanjutnya untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul.

“...ditanya faktor penghambat, secara umum SDM saya rasa. Kita disini hanya beberapa orang, terbatas. Saya akui di Desa Pujonkidul ini kualitas SDMnya masih kurang, pendidikan kita yang ada sampai SMP. Saya rasa itu masih kurang. Sehingga masyarakat juga tingkat pendidikannya juga belum baik, perlu pemahaman lebih. Terlebih lagi hal tadi berdampak juga pada kemampuan kerja kita, terutama bidang TI. Kita sudah mulai mengembangkan itu, tapi geraknya masih sedikit-sedikit. Kalau pendamping desa, kurang menurut saya. Mereka hanya segi administrasi”. (wawancara dengan Bapak Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 9.10).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Kepala Desa Pujonkidul merasa yang menjadi faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa sendiri yakni, terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia); tingkat pendidikan; kemampuan TI (Teknologi Informasi) yang terbatas; dan kurangnya peran pendamping desa.

Untuk mendukung pendapat di atas, peneliti mewawancarai Bendahara Desa Pujonkidul. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Pujonkidul.



“untuk faktor penghambatnya jika berfokus pada pengelolaan keuangan desa. Saya rasa dalam hal pencairan dana. Terkadang dana turun itu terlambat. Desa sudah berusaha, tetapi dana cairnya terlambat. Jelas hal itu menghambat tugas kita, pengelolaan, pelaksanaan, dan seterusnya.” (wawancara dengan Bapak Anas Taufiq selaku Bendahara Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Senin, 25 Juni 2018 jam 10.20).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa menurut Bendahara Desa Pujonkidul, yang menjadi faktor penghambat adalah adanya keterlambatan daripada pencairan dana yang diberikan ke desa. Sehingga merembet ke kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sekretaris Desa Pujonkidul untuk memperoleh pendapat tambahan mengenai faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pujonkidul.

“...sedangkan faktor penghambat pengelolaan keuangan desa adalah sumberdaya manusia. SDM kita di kantor ini terbatas. Kita harus belajar dulu tentang pengelolaan keuangan desa, seperti apa, bagaimana. Pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan. Hal itu kita pelajari sambil praktek. Kalau tidak begitu, tidak jalan mas. Kita terbatas di SDM, pendidikan, TI juga.” (wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekreteri Desa Pujonkidul di Kantor Desa pada Selasa, 26 Juni 2018 jam 8.30).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa menurut Sekretaris Desa Pujonkidul yang menjadi faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa adalah keterbatasan SDM terutama dari segi pendidikan, maupun kemampuan dalam bidang TI.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa adalah, diantaranya: keterbatasan

SDM (sumber daya manusia); tingkat pendidikan; kemampuan TI (teknologi informasi); dan keterlambatan daripada pencairan dana untuk keuangan desa.

## **C. Analisis Data dan Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dengan menerapkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

#### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana Raperdes APBDes ini disepakati bersama pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Raperdes APBDes yang telah disepakati bersama akan disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat, sehingga Peraturan Desa (Perdes) APBDes berlaku.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh sekretaris dengan berdasarkan RKP dan RPJM Desa Pujonkidul. Perencanaan dilakukan berdasarkan RPJM Desa dan RKP Desa dengan mempertimbangkan nilai dan norma masyarakat serta kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa, yang dihadiri oleh perangkat desa, pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, tim pelaksana kegiatan, pendamping desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari kecamatan.

Pada perencanaan pengelolaan keuangan desa ini dilakukan dengan menyusun Rancangan APBDesa oleh sekretaris desa dengan dibantu oleh PTPKD dan bendahara desa. Sebelum hal tersebut, perlu disusun terlebih dahulu RKPDes. Menurut hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pujonkidul bahwa dalam proses penyusunan RKPDes pemerintah desa juga turut melibatkan masyarakat dan BPD.

Selanjutnya sekretaris desa menyusun Raperdes APBDes yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada proses perencanaan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan

oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan desa.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Pujonkidul terkait dengan tahap perencanaan dalam menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan desa, dengan mengadakan musyawarah tingkat desa, dimana sebelumnya telah dilaksanakan musyawarah pada tingkat RT yang berlanjut pada tingkat dusun. Hasil akhir daripada musyawarah desa adalah dokumen RKPDes dan APBDes.

Jika dilihat dengan teori manajemen sektor publik oleh Stoner dalam Domai (2013:32) menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para usaha anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh PTPKD merupakan hal yang serupa dimana terdapat kegiatan perencanaan, pengorganisasian daripada semua sumberdaya desa yang ada. Pada tahap perencanaan PTPKD melibatkan unsur-unsur desa, seperti lembaga desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut menurut Mahmudi dalam Domai (2013:34) menyebutkan bahwa manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan berjangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategik, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Data kinerja dan pelaporan kinerja merupakan umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja.

Jika didasarkan pada teori tersebut, maka telah diterapkan dalam bentuk musyawarah desa. Pada penyusunan RKPDes yang merupakan turunan daripada RPJMDes, yang merupakan program jangka menengah. Maka pada penyusunan RKPDes harus bertujuan untuk berkelanjutan, dengan penetapan sasaran, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja sebelumnya, dimana dalam hal tersebut masyarakat juga ikut dilibatkan.

Menurut Yuwono dkk dalam Domai (2013:35-36) komponen utama proses manajemen strategis meliputi beberapa hal berikut: a) Visi; b) Misi; c) Tujuan; d) Sasaran; e) Kebijakan; f) Program; dan g) Kegiatan. Bilamana didasarkan pada teori tersebut, RPJMDes dan RKPDes yang merupakan acuan daripada APBDes telah mencakup hal-hal yang menjadi komponen utama proses manajemen strategis. Maka perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai teori tersebut.

Selanjutnya jika dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang perencanaan ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Kesatu Perencanaan, pasal 20-23. Telah diatur didalamnya mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut telah dilakukan oleh PTPKD sehingga disahkannya Perdes APBDes.

**Tabel 14 Perbandingan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017**

No	Permendagri	Desa Pujonkidul
1.	Sekdes menyusun Raperdes tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kades dan BPD.	Sekretaris Desa Pujonkidul menyusun Raperdes APBDesa tahun 2017 yang selanjutnya dibahas dan disepakati antara Kepala Desa Pujonkidul dan BPD Desa Pujonkidul.
2.	APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	APBDesa Pujonkidul tahun 2017 disampaikan kepada Bupati Malang melalui Camat Pujon pada tahun berjalan.
3.	APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa	APBDesa dievaluasi oleh Bupati Malang, menetapkan hasil evaluasi, sehingga Perdes APBDesa Pujonkidul tahun 2017 berlaku.



	dinyatakan Raperdesa tidak sesuai.	
4.	Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat.	Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah Desa Pujonkidul antara BPD, Pemdes, dan Unsur Masyarakat Desa Pujonkidul

Berdasarkan tabel diatas, bahwa kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul telah sesuai dengan apa yang menjadi dasar hukumnya yaitu Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang perencanaan ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Kesatu Perencanaan, pasal 20-23. Sehingga mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Tindak lanjut daripada RKPDes ataupun pelaksanaannya melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada APBDes tahun 2017 Desa Pujonkidul memiliki pendapatan sebesar Rp.1.497.261.919,00; yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.491.553.500,00; bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.643.516.750,00; bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.146.450.000,00; serta bidang



pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.202.050.677,00. Sedangkan pada pembiayaan terdapat penerimaan sebesar Rp.36.309.008,00; dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.50.000.000,00. Pengalokasian ini diharapkan akan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Desa Pujonkidul.

Dari hasil analisis di atas, perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dapat dinilai dengan baik dan sesuai sesuai dengan teori yang ada dimana telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Telah melaksanakan asas transparan dan partisipatif, dimana telah melibatkan unsur masyarakat melalui musrenbangdes dengan produk hasil akhirnya adalah APBDes Pujonkidul pada tahun 2017.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa berdasarkan pada RKPDDes dan APBDes yang telah disepakati dan disetujui oleh BPD. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Setelah mendapatkan verifikasi dari sekretaris desa dan mendapat persetujuan kepala desa, selanjutnya bendahara desa memberikan biaya yang diminta dengan dipotong pajak, yang nantinya akan disetorkan kepada kas negara.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dilaksanakan mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk memberikan gambaran umum anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. RAB disusun oleh TPK dan PTPKD. Penyusunan RAB didasarkan pada kebutuhan barang atau jasa dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Penyusunan RAB bertujuan untuk mengetahui berapa banyak anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan. Sehingga dapat diketahui estimasi biaya pengeluaran dari pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya PTPKD mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya). RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan kemudian disahkan oleh kepala desa. Selanjutnya, pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran. Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada kepala desa setelah diterima barang atau jasa.

Dari hasil wawancara bendahara baru melakukan pembayaran setelah pelaksana kegiatan menerima barang atau jasa yang dilanjutkan dengan menyerahkan bukti-bukti berupa SPP, pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi yang lebih dulu diperiksa oleh sekretaris desa.

Maka pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dilaksanakan berdasarkan RAB yang telah dibuat oleh PTPKD

(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa). Sehingga kegiatan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut merupakan salah satu RAB yang dilaksanakan di Desa Pujonkidul.

**Tabel 15 RAB Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana**

URAIAN		ANGGARAN
<b>BELANJA</b>		
	<b>Belanja Modal</b>	<b>Rp 8.260.000,00</b>
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	Rp 8.260.000,00
	<i>rehab gedung pertemuan PKK (keramik) 40 m2</i>	<i>Rp 6.580.000,00</i>
	<i>rehab gedung (kusen)</i>	<i>Rp 1.680.000,00</i>
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.260.000,00</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen RAB Desa Pujonkidul 2017) 2018.

Apabila didasarkan pada teori manajemen sektor publik yang disampaikan Winkel dalam Domai (2013:32) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dengan berdasarkan RAB dapat dikatakan sesuai dengan poin yakni penggunaan seluruh sumberdaya organisasi lainnya, seperti sumberdaya finansial dengan disertai sumberdaya manusia sebagai pelaksana daripada pengelolaan keuangan desa guna tercapai tujuan daripada desa di Desa Pujonkidul.

Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang pelaksanaan ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan, pasal 24-34. Mengatur didalamnya bagaimana mekanisme kegiatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 16 Perbandingan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017**

No.	Permendagri	Desa Pujonkidul
1.	Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah kab/kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah.	Penerimaan dan pengeluaran dilakukan melalui rekening Kas Desa.
2.	Pemdes dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Perdes.	Pemerintah Desa Pujonkidul tidak melakukan pungutan.
3.	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan disertai dengan dokumen a.l. RAB	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan berdasarkan RAB Desa Pujonkidul 2017.
4.	RAB diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	RAB Desa Pujonkidul 2017 diverifikasi oleh Sekretaris Desa Pujonkidul dan disahkan oleh Kepala Desa Pujonkidul.
5.	Pelaksana Kegiatan	Pelaksana Kegiatan yang

	bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran	bertanggungjawab atas tindakan pengeluaran beban anggaran pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul.
6.	Berdasarkan RAB pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa.	Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa Pujonkidul.
7.	SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima	Terkadang SPP dilakukan sebelum barang/jasa diterima.
8.	Pengajuan SPP terdiri dari atas: 1. Surat Permintaan Pembayaran 2. Pernyataan tanggungjawab belanja 3. Lampiran bukti transaksi	Terkadang Pengajuan SPP bukti kurang lengkap.

Berdasarkan tabel diatas, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul pada tahun 2017 telah sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang pelaksanan ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Kedua Pelaksanaan, pasal 24-34. Namun, masih terdapat kekurangan pada kegiatan pendanaan dikarenakan

perlu adanya pendanaan sebelum didapatkan lampiran bukti transaksi.

Berdasarkan analisis di atas, maka pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori yang ada dengan menyesuaikan rencana anggaran belanja (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan telah melaksanakan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, penerapan asas akuntabel terkadang masih terdapat kekurangan dari segi administrasi seperti pada kelengkapan dokumentasi kegiatan jika didasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

### **c. Tahap Penatausahaan**

Pada tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan ini merupakan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

Jika dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang penatausahaan ini

diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Ketiga Penatausahaan, pasal 35-36. Mengatur didalamnya tentang kegiatan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Berikut perbandingan penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

**Tabel 17 Perbandingan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017**

No.	Permendagri	Desa Pujonkidul
1.	Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa.	Dilaksanakan oleh Bendahara Desa yakni Kepala Urusan Keuangan Desa Pujonkidul.
2.	Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.	Dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran.
3.	Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
4.	Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan.	Dipertanggungjawabkan melalui laporan.
5.	Laporan disampaikan setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara desa menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Desa Pujonkidul sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan Kepala Desa Pujonkidul selalu memantau alur masuk keluar uang setiap bulannya.
6.	Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.	Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank dengan dibantu dalam



		aplikasi SISKEUDES.
--	--	---------------------

Selanjutnya jika didasarkan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, maka penatausahaan di Desa Pujonkidul telah dilakukan sesuai peraturan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka penatausahaan yang dilakukan di Desa Pujonkidul oleh bendahara desa dilakukan rutin setiap bulan. Penatausahaan berjalan dengan baik karena kerjasama sinergis antara bendahara desa, kepala desa, PTPKD. Sehingga dapat dikatakan bahwa penatausahaan di Desa Pujonkidul telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### **d. Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Pelaporan berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

Pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang pelaporan ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Keempat Pelaporan, pasal 37. Mengatur didalamnya tentang mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan

desa. berikut perbandingan kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujon tahun 2017 berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

**Tabel 18 Perbandingan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017.**

No.	Permendagri	Desa Pujonkidul
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat berupa: - Laporan semester pertama - Laporan semester akhir	Kepala Desa Pujonkidul telah menyampaikan laporan kepada Bupati Malang melalui Camat Pujon berupa: - Laporan semester pertama - Laporan semester akhir
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa paling lambat bulan akhir Juli tahun berjalan.	Telah dibuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada awal bulan Juli 2017.
3.	Laporan semester akhir paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Telah disampaikan laporan semester akhir pada awal bulan Januari tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas, maka kegiatan pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul dilaporkan oleh Kepala Desa Pujonkidul kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Adapun data prosentase keuangan Desa Pujonkidul sebagai berikut.

Tabel 19 Prosentase Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pujonkidul 2017

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
	Pendapatan Asli Desa	Rp 162.500.000,00	Rp 162.500.000,00	100,0%
	Pendapatan Transfer	Rp 1.383.515.058,00	Rp 1.381.053.610,00	99,8%
	Lain-lain	Rp 31.500.000,00	Rp 31.500.000,00	100,0%
	Pendapatan Desa yang Sah			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.577.515.058,00</b>	<b>Rp 1.575.053.610,00</b>	<b>99,8%</b>
2	<b>BELANJA</b>			
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 444.324.000,00	Rp 420.683.187,00	94,7%
	- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 738.883.889,00	Rp 668.013.757,00	90,4%
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 167.170.500,00	Rp 160.857.090,00	96,2%
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 213.445.677,00	Rp 195.560.586,00	91,6%
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 1.563.824.066,00</b>	<b>Rp 1.445.114.620,00</b>	<b>92,4%</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp 36.309.008,00	Rp 36.309.008,00	100,0%
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	100,0%
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>-Rp 13.690.992,00</b>	<b>-Rp 13.690.992,00</b>	<b>100,0%</b>
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PENGHTUNGAN ANGGARAN</b>	<b>Rp 0,00</b>	<b>Rp 116.247.998,00</b>	<b>7,4%</b>

Sumber: Data Sekunder hasil penelitian yang diolah  
(Dokumen Laporan Realisasi APBDesa Pujonkidul 2017) 2018.

Berdasarkan analisis di atas maka pelaporan telah dilakukan dengan baik dimana dana terserap 92,6% dan disampaikan oleh kepala desa dalam bentuk 2 (dua) laporan semester, yakni semester awal dan semester akhir dengan sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

#### e. Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan kegiatan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes harus dilampiri, diantaranya; format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes; format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember; dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Selanjutnya jika dilihat pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan kepada Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tentang pertanggungjawaban ini diatur pada BAB V Pengelolaan Bagian Kelima Pertanggungjawaban, pasal 38-43. Mengatur didalamnya tentang mekanisme dan format daripada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berikut merupakan perbandingan di Desa Pujonkidul.

**Tabel 20 Perbandingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul Tahun 2017**

No.	Permendagri	Desa Pujonkidul
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap	Telah disampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati

	akhir tahun anggaran.	Malang pada akhir tahun anggaran 2017 oleh Kepala Desa Pujonkidul.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Pujonkidul tahun 2017 telah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: - format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan - kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan - Program Pemerintah & Pemda yang masuk ke Desa	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Pujonkidul tahun 2017 telah dilampiri sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Pujonkidul tahun 2017 telah diinformasikan kepada masyarakat desa dengan media informasi berupa baliho besar yang

		ditempatkan pada beberapa titik strategis di Desa Pujonkidul.
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, maka telah dilakukan oleh Bendahara Desa Pujonkidul dengan menyusun laporan pertanggungjawaban per kegiatan sesuai dengan format aturan atau pedoman laporan pertanggungjawaban yang melandasinya. Selanjutnya laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Adapun format yang telah dibuat mengikuti peraturan dan pedoman yang sudah ada.

Selain itu pertanggungjawaban juga disampaikan ke desa dengan memasang baliho sebagai media informasi untuk menyampaikan penggunaan daripada APBDesa Pujonkidul pada tahun 2017. Media informasi tersebut ada di titik-titik strategis di desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Pujonkidul.

Berdasarkan analisis di atas, maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik dan tertib, dilakukan oleh Kepala Desa Pujonkidul dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat. Format laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan atau pedoman yang melandasinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes juga telah diinformasikan kepada masyarakat secara



tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Pujonkidul. Sehingga kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul tahun 2017 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## **2. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul**

Pada pelaksanaan suatu kegiatan sudah menjadi hal pasti terdapat faktor pendukung di dalam kegiatan tersebut. Faktor pendukung sendiri merupakan hal-hal yang menjadikan berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya pada suatu kegiatan. Begitu juga dengan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul yang memiliki faktor pendukung pada kegiatannya.

Menurut Pasolong dalam Domai (2013:35) manajemen strategik merupakan perpaduan antara konsep “manajemen dan strategik”, manajemen dapat diartikan sebagai proses pergerakan orang dan bukan orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategik dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistematis dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk menerapkan teori tersebut, maka perlu untuk diketahui apa saja yang menjadi faktor pendukung daripada kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Pujonkidul. Berikut ini berdasarkan pada hasil



wawancara tentang faktor pendukung pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul, diantaranya yakni:

Faktor-faktor pendukung daripada kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Pujonkidul adalah:

- 1) Dasar hukum yang jelas dan rinci; dengan adanya dasar hukum atau peraturan yang jelas dan rinci menjadikan PTPKD mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana mekanisme kerja, serta pedoman-pedoman dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Pembagian tugas yang jelas dan sikap tanggungjawab dari PTPKD; pembagian tugas yang jelas telah diatur pada permendagri nomer 113 tahun 2014 menjadikan PTPKD mengetahui tugas kewajibannya dan melaksanakannya dengan baik.
- 3) Sumber anggaran yang pasti dan jelas; dengan adanya sumber anggaran yang pasti dan jelas menjadikan PTPKD dalam menyusun rencana-rencana untuk pembangunan desa menjadi lebih mudah, dengan memperkirakan berapa dana yang harus dipakai dan untuk apa dana dipakai.
- 4) Adanya aplikasi SISKEUDES; dengan adanya SISKEUDES ini menjadikan kegiatan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, terinventaris lebih baik. Terutama pada tugas dari Bendahara Desa.

- 5) Sikap partisipatif masyarakat; dengan adanya sikap partisipatif dari masyarakat merupakan faktor pendukung dalam pembangunan desa, dimana masyarakat menjadi ikut memiliki desa, ikut mengelola desa, dan ikut mendapat manfaat daripada desa.
- 6) Adanya aplikasi WA (*WhatsApp*). Dengan adanya aplikasi WA ini menjadikan lebih mudahnya untuk komunikasi antar PTPKD, BPD, maupun dengan unsur masyarakat desa. sehingga merupakan pemanfaatan dari media komunikasi.

Berdasarkan analisis di atas, maka diharapkan dengan mengetahui faktor pendukung pada pengelolaan keuangan desa. PTPKD tetap mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Sehingga akan tercapai tujuan daripada desa secara efektif dan efisien.

### **3. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa Pujonkidul**

Pada pelaksanaan suatu kegiatan sudah menjadi hal pasti terdapat faktor penghambat di dalam kegiatan tersebut. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan memperlambat sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Begitu juga dengan kegiatan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul yang memiliki faktor penghambat pada kegiatannya.

Menurut Pasolong dalam Domai (2013:35) manajemen strategik merupakan perpaduan antara konsep “manajemen dan strategik”, manajemen dapat diartikan sebagai proses pergerakan orang dan bukan

orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan strategik dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistematis dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

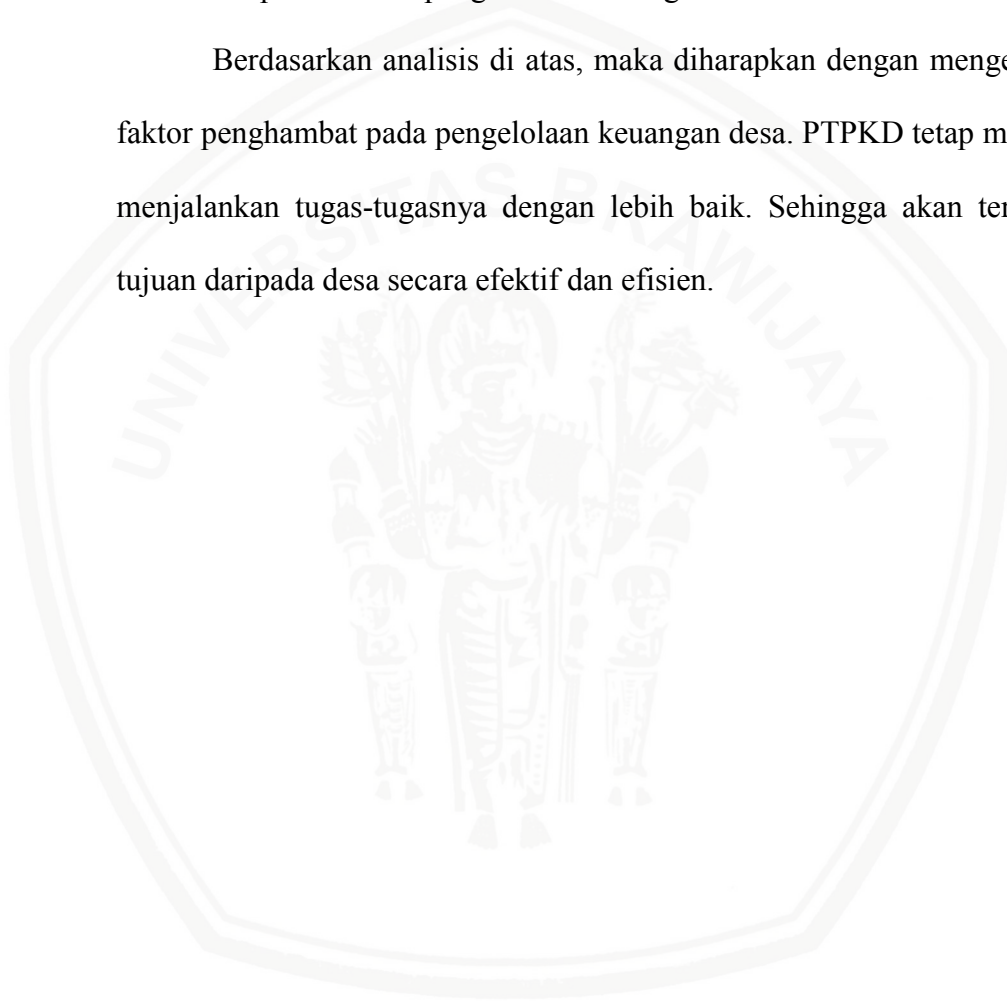
Untuk menerapkan teori tersebut, maka perlu untuk diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat daripada kegiatan pengelolaan keuangan desa pada Desa Pujonkidul. Berikut ini berdasarkan pada hasil wawancara tentang faktor penghambat pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul, diantaranya yakni:

Faktor-faktor penghambat daripada pengelolaan keuangan desa pada Desa Pujonkidul adalah:

- 1) Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada aparatur pemerintah desa, terutama ahli TI (Teknologi Informasi); dimana jumlah aparatur desa sangat terbatas. SDM yang tersedia dan memiliki kemampuan dalam bidang TI sangat diperlukan guna terbukanya informasi-informasi desa kepada masyarakat, terlebih informasi tentang pengelolaan keuangan desa.
- 2) Keterlambatan pencairan anggaran dana; menjadi penghambat dimana meskipun perencanaan kegiatan telah matang, akan tetapi bilamana anggaran dana terdapat keterlambatan dalam pencairan, maka akan mengganggu proses pelaksanaan pembangunan desa.

- 3) Kurangnya pendampingan dari pemerintah di atasnya; yang dimaksud adalah kurangnya peran pendamping desa yang hanya mendampingi dalam hal administrasi saja, tidak sampai pada hal teknis. Ataupun kurangnya pemantauan daripada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan analisis di atas, maka diharapkan dengan mengetahui faktor penghambat pada pengelolaan keuangan desa. PTPKD tetap mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan lebih baik. Sehingga akan tercapai tujuan daripada desa secara efektif dan efisien.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Pujonkidul, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul dimulai dari penyusunan R-APBDesa oleh sekretaris desa melibatkan unsur masyarakat dan BPD. Selanjutnya R-APBDesa dievaluasi oleh bupati melalui camat, sehingga disahkan menjadi APBDesa. Pada APBDesa tahun 2017 Desa Pujonkidul memiliki pendapatan sebesar Rp.1.497.261.919,00; yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar Rp.491.553.500,00; bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.643.516.750,00; bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.146.450.000,00; serta bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.202.050.677,00. Secara bertahap pada perencanaan telah melaksanakan asas transparan dan partisipatif, dimana telah melibatkan unsur masyarakat melalui musrenbangdes. Sehingga tahap perencanaan pada pengelolaan keuangan desa di Desa Pujonkidul telah sesuai berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Tahap Pelaksanaan, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul dilaksanakan oleh PTPKD dengan menyesuaikan rencana anggaran belanja (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan telah melaksanakan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun, penerapan asas akuntabel terkadang masih terdapat kekurangan dari segi administrasi.
3. Tahap Penatausahaan, dilaksanakan oleh Bendahara Desa Pujonkidul, dijabat oleh kepala urusan keuangan. Penatausahaan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Tahap Pelaporan, pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa Pujonkidul ke dalam 2 (dua) laporan semester, yakni semester awal dan semester akhir berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pada saat penelitian dilakukan, pelaporan sudah dilaksanakan pada laporan realisasi semester akhir dengan anggaran yang terserap mencapai 92,6% untuk desa.
5. Tahap Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa Pujonkidul dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Pujonkidul Tahun 2017 kepada Bupati Malang melalui Camat Pujon. Format laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan aturan atau

pedoman yang melandasinya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa juga telah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi berupa baliho besar pada beberapa titik strategis di Desa Pujonkidul yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

6. Faktor-faktor Pendukung, faktor pendukung pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul, diantaranya yakni: Dasar hukum yang jelas dan rinci; Pembagian tugas yang jelas dan sikap tanggungjawab dari PTPKD; Sumber anggaran yang pasti dan jelas; Adanya aplikasi SISKEUDES; Sikap partisipatif masyarakat; serta adanya aplikasi WA (*WhatsApp*).
7. Faktor-faktor penghambat, faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Pujonkidul, diantaranya yakni: Terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada aparatur pemerintah desa, terutama ahli TI (Teknologi Informasi); Keterlambatan pencairan anggaran dana; serta kurangnya pendampingan dari pemerintah di atasnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendampingan dari pemerintah maupun pemerintah daerah kepada aparat pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat



desa dalam pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan terlaksana dengan lebih baik.

2. Perlu adanya bimbingan teknis dalam hal TI (Teknologi Informasi) bagi perangkat desa agar dapat memanfaatkan TI sebagai sarana komunikasi maupun sarana informasi kepada masyarakat luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pujonkidul Tahun 2017.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. 1979-second edition. *Public Policy-making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). \_\_\_\_\_. *Pengawasan Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES*, <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/Leaflet-Simda-Desa.bpkp>, diakses pada 3 Juli 2018.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang. 2017. *Kabupaten Malang dalam Angka 2017*. Malang: BPS Kabupaten Malang.
- Chandler, R. C. & J. P. Plano. 1988. *The Public Administration Dictionary. Second Edition*. Santa Barbara, CA: ABC-CLIO Inc.
- Domai, Tjahjanulun. 2013. *Manajemen Keuangan Publik*. Malang: UB Press.
- Eko, Sutoro. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Erlansyah, Debyawan Dewantara. 2017. *Ini Penilaian Dirjen Perimbangan Keuangan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malang*, <http://www.malangtimes.com/kanal/peristiwa/ini-penilaian-dirjen-perimbangan-keuangan-terhadap-pengelolaan-dana-desa-di-kabupaten-malang>, diakses pada tanggal 8 November 2017.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis Edisi ke-2 Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu – Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017.
- Miles, Huberman, dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. United States of Amerika: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Parson, Wayne. 2006-cetakan kedua. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Pemerintah Desa Pujon Kidul. 2016. *Kondisi Umum Desa Pujon Kidul*, <http://pujonkidul.desa.id/kondisi-umum/#> , diakses pada 19 Desember 2017.
- Profil Dasar Desa Pujonkidul 2017.
- Rencana Kerja Pemerintah Desa Pujonkidul Tahun 2017.
- Sevilla, Consuelo G., Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, dan Gabriel B. Uriarte. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.

- Suharto, Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, Abdul S. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).